

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN
TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SUZI ARIFFANTI

NPM : 167110040

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Suzi Arifanti
NPM : 167110040
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, Maret 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Pembimbing I



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Suzi Ariffanti
NPM : 167110040
Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten
Bengkalis

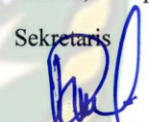
Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, April 2020

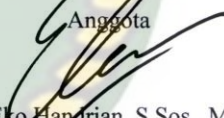
Ketua


Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Anggota


Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

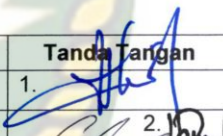
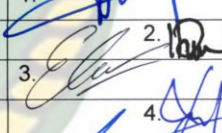
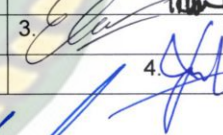

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *141* /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 08 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 April 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Suzi Ariffanti
NPM : 167110040
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis**

Nilai Ujian : Angka : " *81* " ; Huruf : " *A-* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA	Notulen	4. 

Pekanbaru, 09 April 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Suzi Ariffanti
NPM : 167110040
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 09 April 2020

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,



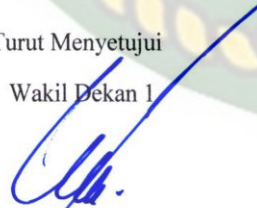
Hendry Andry, S.Sos., M.Si



Dia Meirina Suri, S.Sos., M. Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Prodi Ilmu Administrasi Publik

Ketua



Hendry Andry, S.Sos, M.Si

PERSERBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, Ayahanda . . .

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Bunda, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Bunda lakukan, semua yang terbaik.

Terima kasih selanjutnya untuk kakak-kakak saya yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami di luar rumah.

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing yang dengan sabar melayani saya selama masa bimbingan. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Fakultas Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasannya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimalasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Yogiya, M,Si selaku Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Prodi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nurmasari, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membagi ilmu kepada penulis pada saat proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Khususnya Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan pembelajaran dari wawasan yang beliau-beliau berikan selama masa perkuliahan aktif.
7. Terima kasih yang tulus Ananda kepada ayahanda Suwito, ibunda tercinta Azizah dan kedua abang ku Arif Rakhman dan Azzainudin Nur yang telah memberikan do'a yang teramat tulus, kasih sayangnya, serta dukungannya dalam segala hal untuk mempermudah penulis meraih gelar sarjana strata satu (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik.

8. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang sama-sama menggali ilmu dibangku kuliah khususnya jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut memberikan saran, masukan, dan dukungan terhadap penyelesaian skripsi ini.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis. Amin...

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 20 Maret 2020

Penulis

Suzi Ariffanti



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFRENHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	21
A. Studi Kepustakaan.....	21
B. Kerangka Pikir	35
C. Hipotesis.....	37
D. Konsep Operasional	37
E. Operasional Variabel.....	39
F. Teknik Pengukuran	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel	49
D. Teknik Penarikan Sampel	50
E. Jenis dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data	52
H. Jadwal Waktu Kegiatan.....	53

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	54
B. Profil Singkat Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert	56
C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	57
D. Fungsi dan Tujuan Organisasi	60
E. Sumber Daya Organisasi	60
F. Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PKH)	66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Identitas Responden	70
B. Hasil dan Pembahasan	74
C. Faktor-faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert	100
BAB VI PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel

I. 1	Kriteria Penerima Dana Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH).....	8
I. 2	Skenario Jumlah Bantuan PKH tahun 2019 (pertahapan)	12
I. 3	Jumlah Peserta Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Non Tunai di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis 2019	15
II. 1	Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis .	40
III. 1	Populasi dan Sampel	49
III. 2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis .	53
IV. 1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis	55
IV. 2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2017	61
V. 1	Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin	71
V. 2	Responden Berdasarkan Tingkat Umur	72
V. 3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	73
V. 4	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Standard dan Sasaran Kebijakan	75
V. 5	Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Standard dan Sasaran Kebijakan	77
V. 6	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Sumber Daya	79
V. 7	Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Sumber Daya	81
V. 8	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Komunikasi	83
V. 9	Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Komunikasi	85
V. 10	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Agen Pelaksana	87
V. 11	Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Agen Pelaksana	88
V. 12	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Lingkungan	90
V. 13	Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Lingkungan	92
V. 14	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Sikap Pelaksana	94

V. 15	Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Sikap Pelaksana	95
V. 16	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Terhadap Penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis	97
V. 17	Rekapitulasi Tanggapan Responden Peserta PKH Terhadap Penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar

I. 1	Kerangka Kelembagaan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat	5
I. 2	Contoh Kartu Peserta PKH	13
II. 1	Kerangka Pikir Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis	36
IV. 1	Struktur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1	Daftar Kuesioner Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis .	111
2	Daftar Kuesioner Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis	120
3	Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis	129
4	Daftar Telly Penelitian	133
5	Dokumentasi Penelitian	134

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suzi Ariffanti
NPM : 167110040
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di
Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert
Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2020

Pelaku Pernyataan,

Suzi Ariffanti

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN
TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

Oleh

SUZI ARIFFANTI

(167110040)

Kata kunci : Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan (PKH), penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan fenomena yang dialami oleh setiap bangsa dan negara diseluruh dunia, termasuk negara Indonesia pada saat ini yang masih mengalami permasalahan kemiskinan. Dalam menangani dan menanggulangi kemiskinan harus mengerti betul cara pengkajian untuk memahami dan mencari penjelasan agar tidak terjadi salah urus. Di permasalahan ini pemerintah telah melakukan upaya dengan membuat beberapa kebijakan, salah satunya penyaluran dana bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan pada tahun 2007. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima bantuan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan PKH di Kecamatan Rupal khususnya Kelurahan Tanjung Kapal. Permasalahan dalam penelitian adalah data penerima dana peserta PKH yang kurang akurat, penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh peserta PKH, dan kurangnya sarana dalam kegiatan pelaksanaan PKH. Dalam mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH di Kelurahan Tanjung Kapal belum berjalan secara efektif atau dikategorikan cukup terlaksana. Dikarenakan masih terdapat kesalahan pendataan peserta PKH yang tidak memenuhi kriteria, kemudian penyalahgunaan dana dari peserta PKH diluar dari bidang yang ditentukan serta belum terpenuhi sarana pencairan dana. Agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bisa tercapai, perlu adanya kerja sama yang baik dari pemerintah pusat maupun daerah dengan para peserta penerima dana PKH serta pengawasan dari semua pihak. Dan kesadaran bagi masyarakat peserta PKH dalam penggunaan dana yang diterima.

**THE IMPLEMENTATION OF HOPE FAMILY PROGRAMS (PKH) IN THE
POVERTY ALLEVATION FRAMEWORK IN TANJUNG KAPAL RUPAT
BENGKALIS**

ABSTRACT

By

SUZI ARIFFANTI

(167110040)

Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH), poverty alleviation.

Poverty is a phenomenon that is experienced by every nation and country throughout the world, including the country of Indonesia which is currently still experiencing poverty problems. In dealing with and dealing with poverty, it must be well understood how to study to understand and seek explanations to avoid mismanagement. In this issue the government has made efforts by making a number of policies, one of which is the distribution of the Non-Cash Hope Family Program (PKH) in 2007. poor, processed by the social welfare data and information center. This study aims to determine the description of the implementation of PKH in Rupat District, especially Tanjung Kapal Village. Problems in the study were the inaccurate data on PKH participant recipients, misuse of funds by PKH participants, and the lack of facilities in PKH implementation activities. In uncovering this problem, researchers used quantitative methods with data collection techniques by questionnaire, interview, observation, and documentation. The conclusion of the research shows that the implementation of PKH in Tanjung Kapal Kelurahan has not been effective yet and is categorized as quite implemented. Due to the fact that there are still some data collection on PKH participants who do not meet the criteria, then the misuse of funds from PKH participants outside the specified field and the means for disbursing funds have not yet been met. In order for the policy determined by the government to be achieved, there needs to be good cooperation from the central and regional governments with PKH beneficiary participants as well as supervision from all parties. And awareness of PKH participants in the use of funds received

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penduduk Indonesia yang sangat pesat membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang di alami oleh setiap bangsa dan negara di Dunia. Dan fenomena ini sering dirasakan sampai saat ini oleh negara terbelakang dan negara berkembang, termasuk negara Indonesia yang masih di kategorikan ke dalam negara berkembang. Pemerintah Indonesia secara tegas sudah menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat bahwa salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan salah satu penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan umum ini adalah kemiskinan itu sendiri.

Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji. Permasalahan kemiskinan dapat kita kategorikan ke dalam 4 keadaan. Pertama, kemiskinan absolut yakni keadaan kemiskinan yang di akibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, kemiskinan relative yakni keadaan kemiskinan yang di alami oleh kelompok yang dibandingkan dengan kondisi umum oleh masyarakat lainnya. Ketiga, kemiskinan kultural yakni terfokus kepada sikap, gaya hidup, nilai atau orientasi sosial budaya seseorang di masyarakat yang tidak sejalan dengan kemajuan masyarakat modern. Keempat, kemiskinan struktural yakni kemiskinan

yang diakibatkan oleh ketidakadilan struktural, baik politik maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dapat menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai berbagai faktor yang saling berkaitan, antara tingkat pendapatan, dan tingkat kesehatan.

Ada 14 kriteria Keluarga Miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yakni :

1. Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8m² per orang.
2. Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau lantai kayu berkualitas rendah/bambu.
3. Hidup dalam rumah dengan dinding terbuat dari kayu berkualitas sangat tidak layak untuk di huni.
4. Hidup dalam rumah tanpa listrik.
5. Tidak mendapatkan fasilitas air bersih.
6. Menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah untuk memasak.

7. Makan hanya sekali atau dua kali sehari.
8. Belanja satu set pakaian baru setahun sekali atau tidak sama sekali.
9. Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada puskesmas terdekat.
10. Pendapatan keluarga kurang dari Rp. 600.000,- per bulan.
11. Pendidikan kepala keluarga hanya setingkat Sekolah Dasar.
12. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
13. Memperkerjakan anak dibawah umur.
14. Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

Jika minimal 9 kriteria terpenuhi maka suatu rumah tangga tersebut sudah bisa dikategorikan Keluarga Miskin.

Dalam menangani dan menanggulangi kemiskinan harus mengerti betul tentang kemiskinan dan indikator yang digunakan. Kajian tentang pemahaman kemiskinan yang hakiki dan komprehensif sangat diperlukan untuk memahami dan mencari penjelasan agar tidak terjadi salah urus ketika menanggulangnya. Adapun peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk :

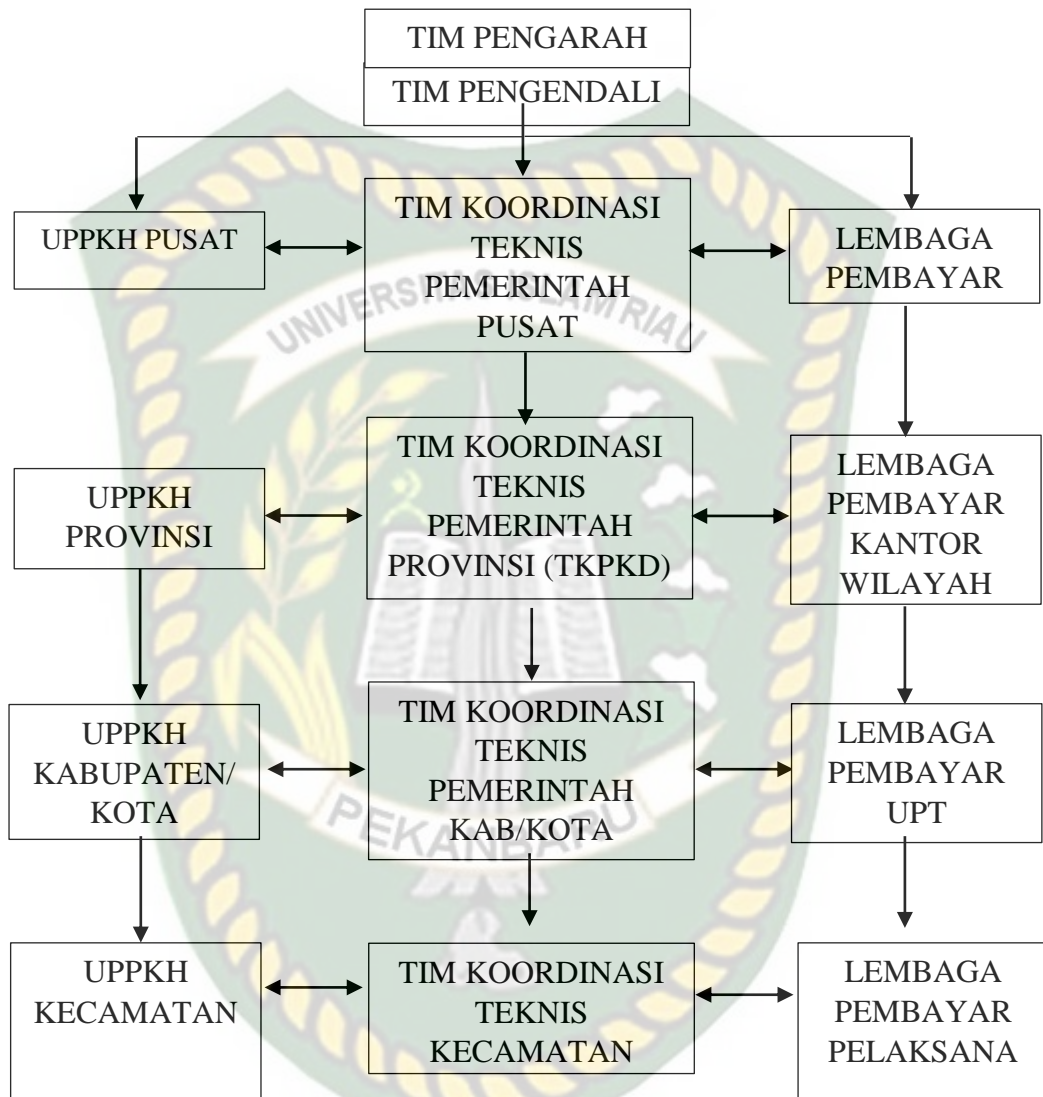
1. Pengembangan potensi diri
2. Bantuan pangan dan sandang
3. Penyediaan pelayanan perumahan
4. Penyediaan pelayanan kesehatan

5. Penyediaan pelayanan pendidikan
6. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
7. Bantuan hukum dan
8. Pelayanan sosial

Dalam permasalahan yang terus bergulir di Indonesia saat ini, pemerintah telah menerapkan penyaluran dana bantuan sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Bantuan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH).

Setelah terbentuknya Tim Pengendali Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibentuk dari Menteri Sosial dan Menteri Koordinator bidang kesejahteraan rakyat yang selaku Ketua Tim Pelaksana ditingkat Nasional. Sementara untuk Tim Tingkat Pelaksanaan Daerah, langsung diambil alih oleh Pemerintah daerah Provinsi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

Gambar I. 1 Kerangka Kelembagaan UPPKH Pusat



Sumber: pedoman umum PKH 2013

Dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial Non Tunai dan bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan

pendapatan keluarga miskin dan rentan. Program Keluarga Harapan (PKH) bukan kelanjutan dari Program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) didalam mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara Non Tunai dilakukan dalam rangka mendukung program keuangan inklusif di Indonesia, dan juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam program penyaluran dana bantuan sosial tersebut sehingga mudah dikontrol/dipantau dan juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan/kecurangan. Di rangkumkan dalam 4 prinsipnya (4T): Tepat sasaran, Tepat Waktu, Tepat jumlah dan Tepat Administrasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu wujud dalam penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan asas tugas pembantu dengan melakukan penugasan dari pemerintahan kepada Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Pasal 2 pada Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan terdapat beberapa tujuan dari Program Keluarga Haparan (PKH), yakni :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Bantuan melalui akses layanan Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Bantuan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Bantuan.

Dengan jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Melalui Program Keluarga Harapan ini akan memberikan 2 manfaat yang cukup akurat agar upaya penanggulangan kemiskinan bisa tercapai, yakni manfaat jangka pendek dan jangka Panjang. Untuk jangka pendek, PKH akan memberikan efek pendapatan kepada Keluarga Penerima Bantuan melalui pengurangan beban pengeluaran setelah menerima dana bantuan Non Tunai dari Program Keluarga Harapan tersebut dan penghasilan yang didapatkan bisa digunakan untuk keperluan lain seperti membuka usaha. Lalu untuk manfaat dari jangka panjangnya ialah program ini dapat mampu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi ke generasi yang selama ini sulit diatasi dari tahun ketahun melalui peningkatan kualitas kesehatan, Pendidikan, dan kesenjangan sosial. Menurut teori dan juga

menurut fakta-fakta yang dapat dilihat, tingkat kemiskinan dalam keluarga secara umum dapat dikaitkan dengan tingkat permasalahan dibidang kesehatan dan Pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikannya. Berbagai permasalahan akan terjadi jika situasi ini tidak bisa diubah, keluarga akan terus menerus terjerumus kedalam lingkaran kemiskinan.

Sasaran atau Keluarga Penerima dana bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan ialah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Namun disamping itu, sasaran atau keluarga penerima bantuan Non Tunai PKH yang bertempat tinggal diwilayah tertentu disebut dengan PKH Akses yang merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah yang sulit di jangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun daya manusia dengan pengkodisian secara khusus.

Tabel I.1 Kriteria Penerima Dana Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH)

NO	Komponen	Sasaran
1	Bidang Kesehatan	- Ibu hamil/menyusui - Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun
2	Bidang Pendidikan	- Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar (SD, SMP, SLTA) terdaftar di sekolah/Pendidikan kesetaraan dan minimal 85% kehadiran dikelas
3	Bidang Kesejahteraan Sosial	- Lanjut usia dari 60 tahun - Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Sumber: pedoman kebijakan tentang PKH

Setelah ditetapkan sasaran Keluarga Penerima Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan, para penerima dana bantuan memiliki hak dan kewajibannya sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No 1 tahun 2018 pasal (6) dan (7). Adapun Hak dari Keluarga Penerima Bantuan ialah:

1. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial.
2. Pendampingan PKH
3. Pelayanan yang difasilitasi kesehatan , Pendidikan dan Kesenjangan sosial
4. Bantuan Komplementer yang berupa uang, barang dan jasa dibidang Kesehatan, Pendidikan, Subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.

Dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Bantuan ialah :

1. Kewajiban memeriksakan kesehatan, peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protocol pelayanan kesehatan dan wajib memenuhi persyaratan kesehatan ibu hamil, anak balita usia 0-6 tahun yang belum masuk sekolah.
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib 12 tahun
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan, penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan, pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Untuk lanjut usia melakukan pemeriksaan

kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial difasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan day care dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti day care dapat mengikuti kegiatan home care dengan pendamping lansia mendatangi kerumah.

Apabila sewaktu-waktu Keluarga Penerima Bantuan dana Non Tunai Program Keluarga Harapan tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya peserta penerima dana PKH akan diberikan sanksi berupa penangguhan atau penghentian penerima dana bantuan sosial PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan beberapa Lembaga/instansi yang berkerja sama yang meliputi : Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BPS, dan PT Pos Indonesia dan Lembaga Keuangan perbankan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH. Sumber pendanaan dana bantuan sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota
4. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (sharing) APBD. Dana

dampingan (sharing) ini digunakan untuk mendukung kegiatan PKH, tidak untuk diberikan kepada Peserta penerima dana PKH. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Sosial nomor 201/MS/C/12/2018 yang berisikan “penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota minimal sebesar 5%”. Kegunaan dana yang dimaksud ialah dana administrasi kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan PKH. Dalam hal ini pemerintah daerah memberi sikap dukungan atas himbauan yang diberikan oleh Pemerintah pusat yang berupa :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH.
2. Penyediaan fasilitas sekretariat Pelaksana PKH Kabupaten.
3. Penyediaan fasilitas sekretariat untuk Pendamping PKH di Kecamatan.

Kemudian, pemerintah daerah mempersiapkan aturan pelaksanaan yang telah dipersiapkan hal-halnya sebagai berikut:

1. Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten membentuk Pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat provinsi/kabupaten/kecamatan.
2. Pembentukan tim koordinasi teknis PKH di provinsi/kabupaten dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
3. Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH kabupaten.
4. Melakukan sosialisasi PKH kepada Tim koordinasi kabupaten dan Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Tabel I.2 Skenario Jumlah Bantuan PKH tahun 2019 (pertahapan)

Skenario Bantuan	Jumlah Bantuan
Bantuan tetap regular	Rp. 550.000
Bantuan tetap PKH Akses	Rp. 1.000.000
Bantuan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Usia 0-6 tahun	Rp. 2.400.000
Bantuan Pendidikan SD	Rp. 900.000
Bantuan Pendidikan SMP	Rp. 1.500.000
Bantuan Pendidikan SMA	Rp. 2.000.000
Bantuan Lanjut Usia dan Disabilitas	Rp. 2.400.000

Sumber: pedoman kebijakan tentang PKH 2019

Bantuan sosial Non Tunai PKH ini diberikan langsung oleh Tim Penyaluran dana PKH Pemerintah Pusat melalui nomor rekening peserta PKH yang sudah terdaftar dan sudah memiliki kartu peserta PKH. Jumlah bantuan yang diterima ke peserta penerima PKH maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Penerimaan dana PKH dilaksanakan sebanyak 4 tahap dalam 1 tahun. Pada tahap pertama dilaksanakan pada Bulan Januari, lalu dilanjutkan pada Bulan April, dilanjutkan pada Bulan Juli, dan pada tahap ke empat dilaksanakan pada Bulan Oktober.

Penerima Dana Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) adalah :

1. Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada keluarga yang bersangkutan.
2. Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah kakak perempuan dewasa
3. Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di Kartu PKH dan bukan wakilnya.

Gambar I. 2 Contoh Kartu Peserta PKH



Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial Non Tunai PKH meliputi:

1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial
2. Sosialisasi dan edukasi
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
4. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH
5. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial

Dengan semua mekanisme ini, Keluarga Penerima Bantuan dana sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan di dampingi oleh pendamping/pelaksana oleh pihak PKH. Penerimaan dana bantuan yang didampingi oleh pendamping ini agar dana bantuan didapatkan dengan tepat sasaran yaitu untuk kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan Keluarga yang

memiliki tingkat Pendidikan yang rendah dan tidak memahami prosedur-prosedurnya sehingga membutuhkan fasilitas pendamping dari pihak PKH. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa ini sebuah implementasi dan erat hubungannya dengan program penanggulangan kemiskinan yang didalamnya meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Kementrian sosial menempatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mendampingi keluarga miskin penerima PKH serta pendamping tersebut juga dapat melakukan evaluasi penggunaan bantuan sebagaimana di syaratkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Pusat. Pendampingan bagi Keluarga Penerima dana PKH dipergunakan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping PKH menjalankan fungsi fasilitas, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima dana PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping PKH juga memastikan peserta Keluarga Penerima dana PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku Keluarga Penerima dana PKH. Dalam melaksanakan tugas pendampingan , pendamping PKH membentuk kelompok Keluarga Penerima dana PKH berdasarkan wilayah dampungannya. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial melakukan pembentukan pendamping PKH di setiap kecamatan dan kelurahan/desa yang berada di Kabupaten Bengkalis

termasuk didalamnya pembagian pendamping di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert.

Pada tabel I.3 diatas terdapat 7 skenario bantuan yang jumlah bantuannya bervariasi sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Pada Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Rupert yang mana pada tahun 2019 tercatat penerima dana bantuan Non Tunai PKH sebanyak 2.383 keluarga yang tersebar di 16 kelurahan/desa di Kecamatan Rupert.

Tabel I.3 Jumlah peserta Keluarga Miskin penerima dana bantuan Non Tunai di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penerima
1	Batu Panjang	254
2	Darul Aman	89
3	Dungun Baru	87
4	Hutan Panjang	118
5	Makeruh	111
6	Pancur Jaya	120
7	Pangkalan Nyirih	108
8	Pangkalan Pinang	72
9	Parit Kebumen	87
10	Pergam	194
11	Sei Cingam	111
12	Sri Tanjung	167
13	Sukarjo Mesim	191
14	Tanjung Kapal	200
15	Teluk Lecah	162
16	Terkul	317
Jumlah		2.383

Sumber: Dinas sosial Kabupaten Bengkalis 2019

Dari data diatas terlihat bahwa Kelurahan Terkul yang memiliki jumlah penerima dana bantuan Non Tunai terbanyak yakni 317 peserta keluarga. Namun yang menjadi fokus penelitian adalah di Kelurahan Tanjung Kapal yang jumlah

penerima dana nya sebanyak 200 peserta keluarga. Sebelumnya diketahui bahwa Kelurahan Tanjung Kapal memiliki jumlah penduduk sebanyak 4232 orang yang tersebar di 16 RT dan 8 RW. Yang terletak cukup jauh dari pusat perkantoran Kabupaten Bengkalis, maka untuk kesediaan sarana prasana pun masih tidak memadai di Kelurahan Tanjung Kapal ini. Kelurahan Tanjung Kapal sebagian dari jumlah penduduknya ialah yang dikriteriakan keluarga kurang mampu atau keluarga sangat miskin. Masuknya Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tanjung Kapal ini menjadi harapan besar bagi pemerintah Kelurahan Tanjung Kapal untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya. Yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Tanjung Kapal adalah pada bidang Kesehatan dan Pendidikan. Sesuai data yang tercatat di Dinas Sosial ada 148 orang yang menerima dana bantuan Non Tunai PKH di bidang Kesehatan dan Pendidikan yang berarti sisanya 52 orang adalah penerima dana bantuan Non Tunai PKH bidang kesejahteraan sosial.

Dengan adanya penerimaan dana PKH ini pemerintah benar-benar mengharapkan keluarga penerima dana bantuan dapat menggunakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti menyekolahkan anak-anaknya dan mengutamakan kesehatan. Tetapi pada realitanya, peserta penerima dana PKH di Kelurahan Tanjung Kapal menyalahgunakan fungsi uang yang diberikan oleh pemerintah untuk kebutuhan diluar itu. Misalnya uang tersebut digunakan untuk membayar hutang, membeli pakaian (shopping), membayar credit motor, dan lainnya. Ini disebabkan karena egoisme diri peserta penerima dana PKH tersebut dan juga disebabkan kurangnya pendamping PKH untuk memberikan penyuluhan

kepada peserta terkait dengan Kesehatan dan Pendidikan. Adapula permasalahan lain yang didapatkan dilapangan ialah salah sasaran keluarga penerima dana bantuan Non Tunai PKH. Keluarga tersebut cukup mampu dalam kehidupannya, memiliki rumah yang layak huni, memiliki kendaraan lebih dari satu dan berpenghasilan yang cukup namun mereka menerima dana PKH. Kesalahan ini mungkin terjadi saat pemerintah melakukan pendataan yang kurang akurat dan menggunakan data yang lama dan belum di upgrade. Karena yang melaksanakan pendataan adalah Tim Koordinasi langsung dari pusat bukan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dikemukakan, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan terjadi dilapangan yang dapat dilihat sebagai fenomena, ialah :

1. Terindikasi adanya permasalahan data Keluarga Miskin (RTSM) penerima dana PKH yang kurang akurat.
2. Penyalahgunaan dana PKH terhadap peserta penerima PKH, yang seharusnya dana PKH tersebut digunakan untuk keperluan dibidang kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial tetapi malah dipergunakan untuk kegunaan diluar itu.
3. Kurangnya sarana dalam kegiatan pelaksanaan PKH. Dicontohkan apabila ada kendala dalam pencairan dana PKH ataupun terjadi kerusakan PIN rekening penerima dana tersebut, peserta penerima dana PKH harus mengurusnya keluar daerah seperti di kota Dumai. Dikarenakan di daerah kecamatan Rupert tersebut tidak memiliki cabang kantor BANK yang

menangani seluruh pencairan dana PKH yang ada hanya cuma agen-agen kecil.

Demikian hasil fenomena yang didapat langsung dari peneliti dari berbagai data dan sumber dengan langsung turun kelapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program PKH. Dan pemaparan dari latar belakang yang menjadi dasar dan ketertiban penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah peneliti paparkan diatas, maka peneliti dapat mengangkat permasalahan penelitian tentang **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis”**. Dengan mencakup beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil yang dilakukan dari peneliti ini diharapkan bisa memberikan manfaat ataupun kegunaan kepada beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjawab keingintahuan peneliti tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

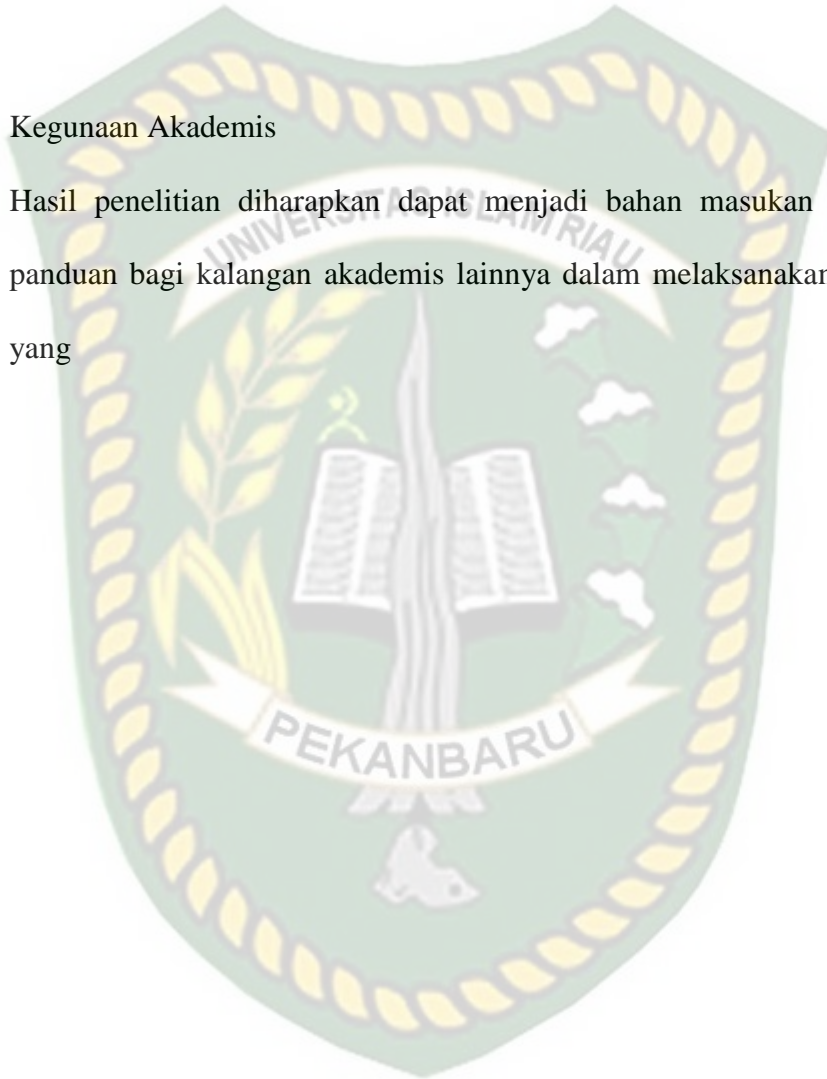
b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi kepada pihak terkait yang melaksanakan

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa
Kabupaten Bengkalis.

c. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan panduan bagi kalangan akademis lainnya dalam melaksanakan penelitian yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk lebih memperjelas konsep dan arah penelitian ini, maka perlu dijabarkan beberapa konsep dan teori-teori menurut beberapa para ahli yang sesuai dengan tujuan penelitian. Konsep dan teori-teori yang digunakan merupakan rangkain yang akan dikaitkan dan dihubungkan pada permasalahan.

1. Konsep Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2003;3) administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi sebagai proses, yakni dikatakan sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak diketahui. Dengan demikian administrasi adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Bilamana proses itu akan berakhir tidak diketahui karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dan tidak ada yang mengetahui. Malahan mereka sendiripun mungkin tidak mengetahuinya. Telah dikatakan pula bahwa unsur-unsur dari administrasi ialah :

- a. Dua orang manusia atau lebih : seseorang tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri karena itu harus ada orang lain yang secara sukarela atau dengan cara lain diajak turut serta dalam proses kerja sama itu.

- b. Tujuan : tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh semua orang yang terlibat dalam proses administrasi itu. Tujuan tersebut dapat ditentukan oleh sebagian atau oleh seseorang dari mereka yang terlibat.
- c. Tugas yang hendak dilaksanakan : tugas pelaksanaannya akan lebih efisien dan ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerja sama satu sama lain.
- d. Peralatan dan perlengkapan : peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu proses administrasi tergantung dari berbagai factor seperti jumlah orang yang terlibat dalam proses itu dan juga bisa dilihat dari sifat tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Woodrow Wilson administrasi merupakan suatu bidang usaha (*a field of business*) dan harus dipisahkan dari politik (dalam Miftah Thoha, 2008;8).

Menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi adalah suatu fenomena social, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi (dalam Inu Kencana Syafii, 2015;4).

Selain itu, administrasi menurut Herbert A. Simon adalah sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (dalam Harbani Pasolong, 2016;2).

The lieng Gie mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Harbani Pasolong, 2016;3).

Dari beberapa definisi ini, dapat dipahami bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien melalui tindakan yang rasional. Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang realistis dan benar-benar tepat, logis dan dapat dikerjakan. Jadi perencanaan berfungsi sebagai landasan kebijakan administrasi dan merupakan wujud konkret dari tujuan. Untuk membuat perencanaan yang tepat diperlukan juga sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya non-manusia yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi. Berdasarkan kompetensi tersebut dapat disusun pengorganisasian (organizing) secara benar dan objektif yang sesuai “prinsip the right man on the right place).

2. Konsep Organisasi

Dalam pelaksanaan administrasi, organisasi merupakan suatu tempat atau wadah yang menjalankan administrasi yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Tanpa adanya organisasi, administrasi tidak akan berjalan dengan baik, dan pula tanpa administrasi di dalam sebuah organisasi, maka tujuan organisasi akan sulit dicapai secara efektif dan efisien. Keduanya sangat berkaitan erat.

Menurut James D. Mooney organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I. Barnard memberikan pengertian Organisasi yaitu suatu system aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;99).

Menurut Sondang P. Siagian (2003;6) organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Definisi ini menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yakni :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan (bersifat statis).
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal (bersifat dinamis).

Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen terlihat apabila bahwa bergerak tidaknya organisasi kearah pencapaian tujuan sangat tergantung atas kemampuan manusia dalam organisasi menggerakkan organisasi itu ke arah yang telah ditetapkan dan nilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik. yang dimaksud dengan organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri (sifat) sebagai berikut :

- a) Terdapat tujuan yang jelas
- b) Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
- c) Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
- d) Adanya kesatuan arah (*unity of direction*)
- e) Adanya kesatuan perintah (*unity of command*)
- f) Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang

- g) Adanya pembagian tugas (*distribution of work*)
- h) Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
- i) Pola dasar organisasi harus relatif permanen
- j) Adanya jaminan jabatan (*security of tenure*)
- k) Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan
- l) Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya (*the right man on the right place*)

Menurut Siswanto (2015;73) organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Berdasarkan definisi ini jelas bahwa dalam suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yakni :

- a. sekelompok orang
- b. interaksi dan kerja sama
- c. tujuan bersama

Menurut Gareth Morgan dan Stephen P. Robin (dalam Siswanto 2015;74) mengemukakan bahwa organisasi seringkali dikonsepsikan dengan cara yang berbeda, diantaranya ialah :

- a. Kesatuan rasional dalam mengejar tujuan
- b. Koalisi dari para pendukung (*constituency*) yang kuat
- c. Sistem terbuka
- d. Sistem yang memproduksi arti
- e. Sistem yang digabungkan secara longgar
- f. Sistem politik
- g. Alat dominasi
- h. Unit pemrosesan informasi
- i. Penjara psikis

j. Kontrak sosial

Dari seluruh definisi-definisi yang telah di paparkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota organisasi, penetapan hubungan antarpekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan. Dan manager adalah seseorang yang menjadikan pimpinan dalam mengerjakan kegiatan manajemen ini disuatu Lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Sondang P. Siagian (2003;5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang , yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka penacapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Sedangkan Henry Simamora berpendapat manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan (dalam Harbani Pasolong, 2016;83).

Menurut Haiman manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5).

Menurut Darwis, et.al. (dalam Made Devi Wedayanti, 2018;3) manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

James A.F Stoner dan Charles Wankel manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi (dalam Siswanto, 2015;2).

Menurut George R. Terry (dalam Siswanto2015;18) batasan manajemen diatas prosesnya meliputi :

- a. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan
- b. Pengorganisasian, yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan
- c. Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin
- d. Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan

Siswanto (2015:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan , pemativasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan (*approach*) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terkait oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia. Manajemen sebagai suatu seni bukan diartikan seni dalam arti formal yang biasa dihubungkan dengan seni musik, sastra, tari, drama, patung, lukis dan sebagainya.

Dengan demikian, bukan berarti bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik harus menjadi seorang seniman, atau seorang pemimpin minimal harus

menguasai salah satu cabang kesenian seperti menari, menyanyi, dan melukis. Yang dimaksud seni disini adalah seni dalam pengertian yang lebih luas dan umum, yaitu merupakan keahlian, kemampuan, kemahiran, serta keterampilan dalam aplikasi prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Tujuan manajemen adalah suatu yang ingin direalisasikan, yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahannya kepada usaha seorang pimpinan. Tujuan manajemen juga mengandung arti ketetapan (*definitness*). Gagasan yang dinyatakan dengan istilah yang samar-samar dan memiliki nilai manajemen yang minimum. Untuk mengilustrasikan hal yang demikian, sesuatu yang ingin direalisasikan seperti hasilkan sebanyak-banyaknya, selesaikan secepat mungkin. Hal itu karena tujuan pada umumnya menunjukkan hasil yang harus direalisasikan dan memisahkan hasilnya dari berbagai hal yang ingin direalisasikan yang mungkin ada.

4. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah ini tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang awam istilah-istilah ini bisa membingungkan.

Syafiie mengemukakan bahwa kebijakan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan penetapan aturan yang ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu syafiie mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (dalam Arifin Tahir, 2015;20).

Sedangkan menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (dalam Arifin Tahir, 2015;21).

Menurut Rian Nugroho (2003;51) kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka kebijakan publik adalah seluruh sarana prasarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut.

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (dalam Harbani Pasolong, 2016;40) kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yakni :

- a. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum
- b. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota
- c. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Menurut William N. Dunn kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh Lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, Pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (dalam Harbani Pasolong, 2016;39).

Chaizi Nasucha mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan menjadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis (dalam Harbani Pasolong, 2016;39).

Menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut (dalam Arifin Tahir, 2015;25).

Menurut Wilson kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang di ambil/gagal diambil untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi (dalam Solichin Abdul Wahab, 2016;13).

Sekalipun definisi menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut, namun demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Charles O. Jones (dalam Arifin Tahir, 2015;28) menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen:

- a. *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
- b. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
- c. *Program*, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
- d. *Decisions* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e. *Efec*, yaitu akibat-akibat dari program baik sengaja atau tidak, primer atau sekunder.

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan dan kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

5. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan tidak hanya menyangkut perilaku Lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Abdul Wahab pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses pelaksanaan (dalam Arifin Tahir, 2015;55).

Menurut Grindle pelaksanaan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya (dalam Harbani Pasolong, 2016;57-58).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabaiter pelaksanaan ialah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (dalam Solicin Abdul Wahab, 2012;135).

D. L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Harbani Pasolong 2016:59)

mereka mengatakan ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan :

- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
- b. Hakekat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu assembling produktif
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Dalam berbagai praktek, terlihat bahwa suatu keputusan telah ditetapkan, tidak selalu dilaksanakan dengan tertib dan rapi. Seandainya suatu rencana keputusan yang terdiri dari seperangkat tujuan/sasaran, sarana dan waktu yang dipilih dan ditetapkan dalam pelaksanaannya, banyak terjadi bahwa keputusan tersebut hampir selalu harus disesuaikan lagi. Sehubungan dengan itu, Anderson (dalam Arifin Tahir, 2015;56-57) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Siapa yang dilibatkan dalam pelaksanaan
- b. Hakikat proses pelaksanaan
- c. Kepatuhan atas suatu kebijakan
- d. Efek atau dampak dari pelaksanaan

Pandangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan keputusan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2012;135) pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Arifin Tahir, 2015;71-72) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi pelaksanaan, yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Komunikasi
- d. Agen pelaksana
- e. Lingkungan
- f. Sikap para pelaksana

Dalam teorinya ini, mereka mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses pelaksanaan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan pelaksanaan dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*).

6. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan Pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, Pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program-program bantuan komplementer ini ialah:

- a. Jaminan Kesehatan Sosial
- b. Rastra
- c. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- d. Program Indonesia Pintar (PIP)
- e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- f. Rumah Tangga Layak Huni (RUTILAHU)

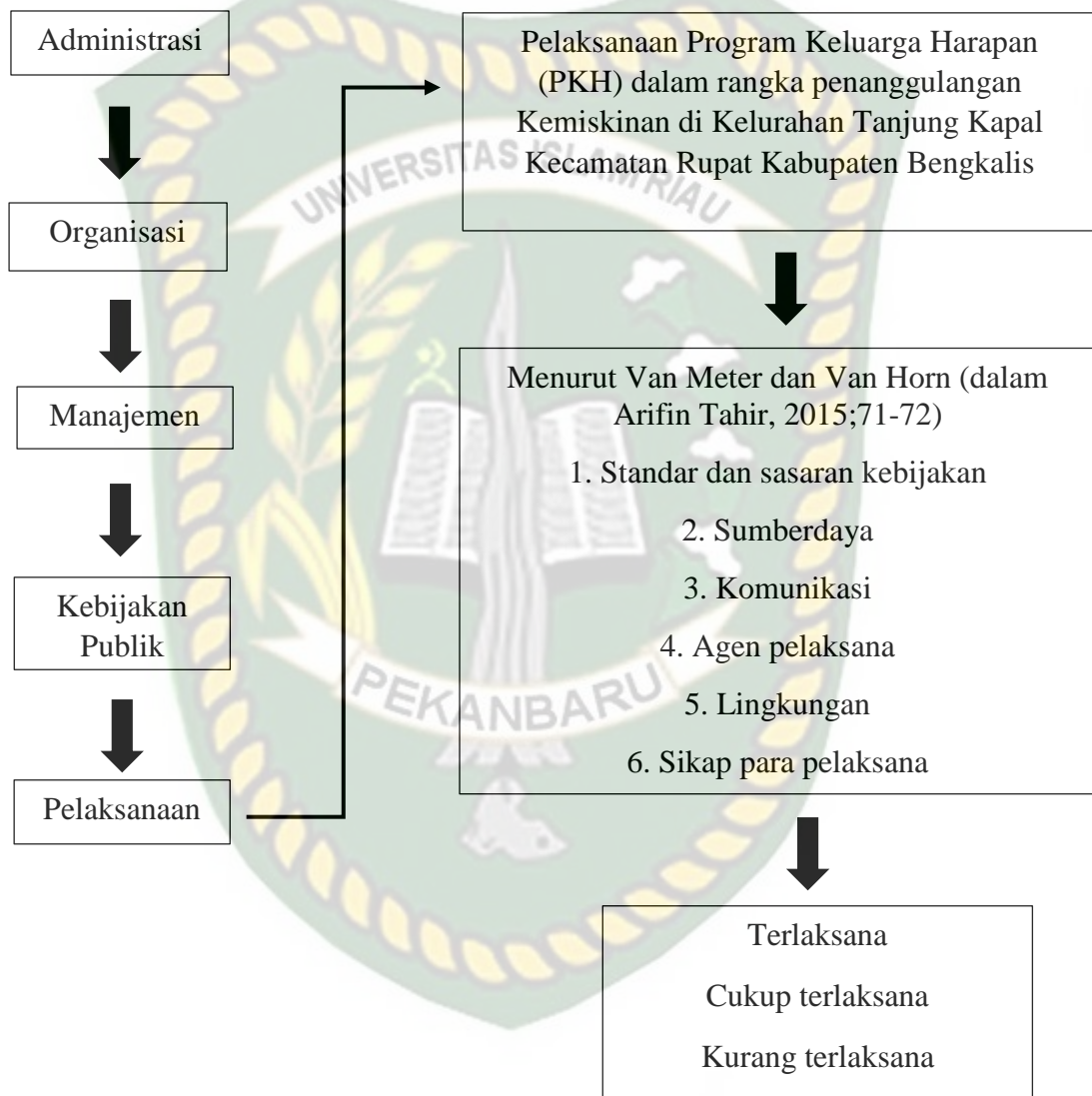
- g. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
- h. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
- i. Bantuan Sosial Lainnya

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur penelitian yang akan dilakukan yang mana didalamnya terdapat konsep yang memiliki keterkaitan dengan teori-teori dan indikator yang relevan yang akan dipakai dalam menganalisis atau memecahkan masalah dalam suatu penelitian yang dilakukan peneliti. Berdasarkan pada permasalahan, studi pustaka yang dijadikan indikator penelitian tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis maka penulis menjelaskan gambaran kerangka pikir pada gambar dibawah ini.

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.



C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta konsep teoritis yang telah dikemukakan maka hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah **“Diduga Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik dan maksimal”**.

D. Konsep Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti maupun mendeskripsikan kegiatan maupun memberikan suatu operasional (yang digunakan untuk mengukur variabel yang berikutnya).

Untuk mempermudah dari kesalahpahaman dari beberapa konsep ataupun dari istilah-istilah lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan dalam konsep operasional yang antara lain :

1. Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan

3. Manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.
4. Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang di ambil/gagal diambil untuk dilaksanakan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).
5. Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
6. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
7. Standar dan sasaran kebijakan adalah sasaran dari suatu tujuan dalam program jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
8. Sumber daya adalah dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan berupa dukungan sumber daya manusia, finansial dan waktu.
9. Komunikasi adalah mekanisme prosedur yang direncanakan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi.

10. Agen pelaksana adalah daya dukung berupa struktur organisasi, nilai-nilai dalam organisasi dan hubungan internal organisasi.
11. Lingkungan adalah suatu tempat yang mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang meliputi lingkungan ekonomi, sosial dan pemerintah.
12. Sikap para pelaksana adalah sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kegiatan suatu kebijakan.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan bahasan penilaian yang telah ditentukan dalam penelitian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi kepustakaan, dalam penelitian ini operasional variabel disajikan dalam bentuk table, agar lebih memudahkan dalam menyusun uraian konsep variabel, yang mana terdiri indikator, ukuran skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.I Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2012;135) pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang	Pelaksanaan PKH	1. Standar dan sasaran kebijakan	a.data penerima dana b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia c. penggunaan dana dibidang kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

telah digariskan dalam keputusan kebijakan.		2. Sumber daya	a. Sumber daya manusia	Terlaksana
			b. Sumber daya waktu	Cukup
			c. Sumber daya finansial	Terlaksana
		3. Komunikasi	a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PKH	Terlaksana
			b. Kejelasan informasi dan peraturan pihak pelaksana (pendamping) kepada peserta penerima dana PKH.	Cukup
			c. Rapat antara pendamping	Terlaksana

			dan Dinas Sosial.	
		4. Agen Pelaksana	a. Daya dukung organisasi	Terlaksana
			b. Nilai-nilai dalam organisasi	Cukup Terlaksana
			c. Hubungan didalam organisasi	Kurang Terlaksana
		5. Lingkungan	a. Ekonomi	Terlaksana
			b. Sosial	Cukup
			c. Pemerintah	Terlaksana
		6. Sikap Pelaksana		Kurang Terlaksana
			a. Demokratis	Terlaksana
			b. Responsive	Cukup
			c. Transparan/ keterbukaan	Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi penulis, 2019

F. Teknik Pengukuran

Penelitian setiap indikator ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018;93). Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini menggunakan 3 kategori penilaian, yakni: Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana. Setiap jawaban diberi penilaian secara persentase sebagai berikut:

- a. Terlaksana dengan persentase 67%-100%
- b. Cukup Terlaksana dengan persentase 34%-66%
- c. Kurang Terlaksana dengan persentase 1%-33%

Untuk mengukur penilaian variabel penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila seluruh indikator Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis berada pada kategori 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh indikator Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila seluruh indikator Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis berada pada persentase 1%-33%.

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator ialah:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada persentase 1%-33%.

2. Sumber daya

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator sumber daya berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator sumber daya berada pada persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator sumber daya berada pada persentase 1%-33%.

3. Komunikasi

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator komunikasi berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator komunikasi berada pada persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator komunikasi berada pada persentase 1%-33%.

4. Agen Pelaksana

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator agen pelaksana berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator agen pelaksana berada pada persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator agen pelaksana berada pada persentase 1%-33%.

5. Lingkungan

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator lingkungan berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator lingkungan berada pada persentase 34%-66%.

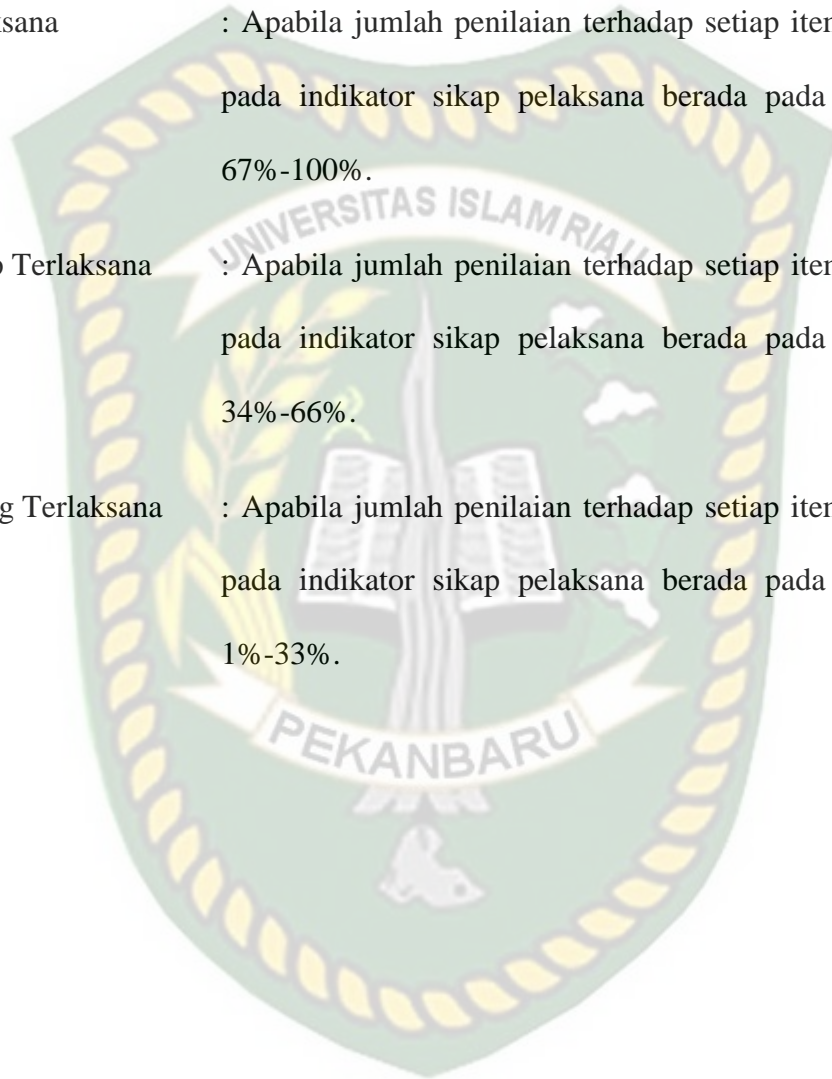
Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator lingkungan berada pada persentase 1%-33%.

6. Sikap Pelaksana

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator sikap pelaksana berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator sikap pelaksana berada pada persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator sikap pelaksana berada pada persentase 1%-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif yakni penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Penggunaan tipe kuantitatif akan mempermudah penulisan untuk menghitung hasil penelitian selanjutnya untuk menjelaskan isi dari tabel tersebut dan penulis menggunakan penjelasan data tipe deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Lokasi ini dipilih karena pelaksanaan PKH di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa terdapat beberapa fenomena-fenomena permasalahan yang menghambat pelaksanaan PKH, sehingga prosesnya tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018;80). Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik /sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018;81). Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Tabel III.1 Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Dinas sosial Kab. Bengkalis	1	1
2	KASI Jaminan sosial keluarga	1	1
3	Pegawai Bidang Bantuan sosial	8	8
4	Pendamping PKH Kec. Rupal	2	2
5	Peserta penerima dana PKH Kel. Tanjung kapal	200	18
Jumlah		212	30

Sumber: Dinas Sosial kabupaten Bengkalis dan modifikasi penulis, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam setiap penelitian teknik penarikan sampel disesuaikan dengan populasinya. Berdasarkan pertimbangan untuk menentukan sampel responden pegawai Dinas Sosial peneliti menggunakan teknik sensus, penggunaan teknik ini berlaku jika populasi relative kecil dan dapat dijangkau. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat maka peneliti mengambil seluruh jumlah populasi pegawai Dinas Sosial dijadikan sampel dengan jumlah 12 orang.

Kemudian untuk menentukan sampel peserta PKH peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan atas penilaian atau tujuan tertentu saja dan dianggap sudah mewakili dari keseluruhan jumlah populasi. Diketahui jumlah populasi peserta PKH sebanyak 200 orang, peneliti membatasi sampel menjadi 18 orang. Hasil ini didapatkan dari pencarian menggunakan rumus $n = \frac{N}{1+N.e}$. Maka jumlah keseluruhan sampel penelitian menjadi 30 orang. Dengan jumlah sampel ini peneliti tidak memakan waktu yang lama untuk melakukan penelitian dan penyebaran kuesioner.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menurut jenisnya terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

2. Data sekunder, yaitu data yang peneliti peroleh dari sumber-sumber buku , dokumen, jurnal yang dapat dijadikan data pendukung dalam melakukan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang valid yang dibutuhkan peneliti, maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan peserta penerima dana PKH Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di idi oleh responden, dengan cara memberikan kuesioner langsung kepada kepala Dinas Sosial dan peserta penerima dana PKH sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki responden dan diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara yang penulis pakai adalah wawancara terstruktur.

3. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (dalam Sugiyono, 2015;145). Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi terstruktur, observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati.

4. Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, akan tetapi melalui dokumen-dokumen yang diperlukan guna melengkapi pengumpulan data primer diatas, dan dilakukan pula pengumpulan data sekunder.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian melalui instrument atau alat penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuesioner dan daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan dan di olah untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian secara kuantitatif atau pengelompokkan dan penyajian data melalui angka-angka yang berbentuk tabel atau tunggal. Kemudian data tersebut di presentasikan, dijelaskan dan dianalisa secara deskriptif kuantitatif sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapatkan hasil penelitian tersebut kemudian di ambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal waktu kegiatan penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Daftar wawancara																												
5	Rekomendasi survey																												
6	Survey lapangan																												
7	Analisis data																												
8	Penyusunan skripsi																												
9	Konsultasi revisi skripsi																												
10	Ujian Konfrehensif																												
11	Revisi skripsi																												
12	Penggandaan skripsi																												

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis terbentuk berdasarkan UU No 12 tahun 1956 lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956. Ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis di pimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, dikarenakan dilalui oleh jalur kapal-kapal besar internasional paling sibuk di dunia. Yakni Selat Malaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Wilayahnya mencakup pada bagian timur Pulau Sumatera antara 2°30 Lintang Utara (LU), -0°17 Lintang Utara (LU) atau 100°52 Bujur Timur (BT), -102°52 Bujur Timur (BT), -102°Bujur Timur (BT) dan dengan luasnya 7.793,93 km² meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 446 km² yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun

Sebelah Selatan : Kabupaten Siak

Sebelah Barat : Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu

Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Dataran rendah nya dengan rata-rata ketinggian 2-6, 1 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Bengkalis beriklim tropis sangat dipengaruhi sifat iklim laut dengan temperatur berkisar 26° - 32°C dengan kelembapan 85%. Musim hujan berlangsung antar bulan September hingga Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 900-1.500 mm/tahun. Sedangkan musim kemarau berlangsung pada bulan Februari hingga Agustus. Selain itu juga, Kabupaten Bengkalis juga mengenal empat musim yakni angin utara, timur, barat, dan selatan.

Secara Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Bengkalis memiliki 8 Kecamatan dan 102 Kelurahan/Desa pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014, telah aktif 53 desa baru hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08-15 tahun 2012 sehingga jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis menjadi 155 desa/kelurahan.

Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Mandau	937,47	293.513
2	Pinggir	2.503,00	8.6535
3	Bukit Batu	1.128,00	32.840
4	Siak Kecil	742,21	20.220
5	Rupat	896,35	33.063
6	Rupat Utara	628,50	14.201
7	Bengkalis	514,00	78.571
8	Bantan	424,40	39.044
	Jumlah	7.773,93	543.987

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis, 2017

Penduduk Kabupaten Bengkalis sangat Heterogen dengan mayoritas beragama islam. Selain suku melayu yang merupakan suku khas, penduduk kabupaten Bengkalis berasal dari berbagai suku bangsa seperti Aceh, Banjar, Batak, Bugis, Jawa, Minang, Sunda, dan Tiong Hoa. Dan Bengkalis sebagai Ibukota Kabupaten dikenal juga dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil telur ikan terubuk yang sangat disukai masyarakatnya dengan rasa yang sangat lezat dan tentu saja menyebabkan harga telur ikan terubuk ini menjadi amat mahal. Berkembangnya Kabupaten ini juga didukung adanya pertambangan minyak di Kecamatan Mandau Duri, dari pertambangan minyak ini menghasilkan minyak dan gas yang menjadi sumber terbesar APBD Kabupaten Bengkalis.

B. Profil Singkat Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert

Kecamatan Rupert merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Secara geografisnya, kecamatan Rupert berbatasan dengan kecamatan Rupert Utara dikarenakan dua kecamatan ini terletak di satu Pulau yang dinamakan Pulau Rupert. Secara geografis kecamatan Rupert berbatasan dengan kecamatan Rupert Utara sebelah utara, lalu sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah selatan berbatasan dengan Bengkalis, dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan letak posisinya, sebagian besar desa/kelurahan di kecamatan Rupert berada di pesisir pantai termasuk Kelurahan Tanjung Kapal yang menjadi lokasi penelitian. Luas wilayah kelurahan Tanjung Kapal adalah 124,00 km²

dengan jumlah penduduk sebanyak 4.232 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.085. Penghasilan utama daerah ini adalah Perkebunan dan Pertanian. Secara geografisnya, kelurahan Tanjung Kapal berbatasan dengan kelurahan Batu Panjang dan desa Darul Aman. Wilayah Tanjung Kapal terbagi dalam beberapa dusun, yakni:

1. Dusun Tanjung Kapal
2. Dusun Parit Joko
3. Dusun Parit Dua (Teluk Mempelam)
4. Dusun Parit Satu
5. Dusun Sri Rupas
6. Dusun Rampang Jaya
7. Dusun Gunap
8. Dusun Rampang Akit (Proyek)

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SekDa). Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Bengkalis.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memiliki Visi dan Misi, yakni :

Visi :

- Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Misi :

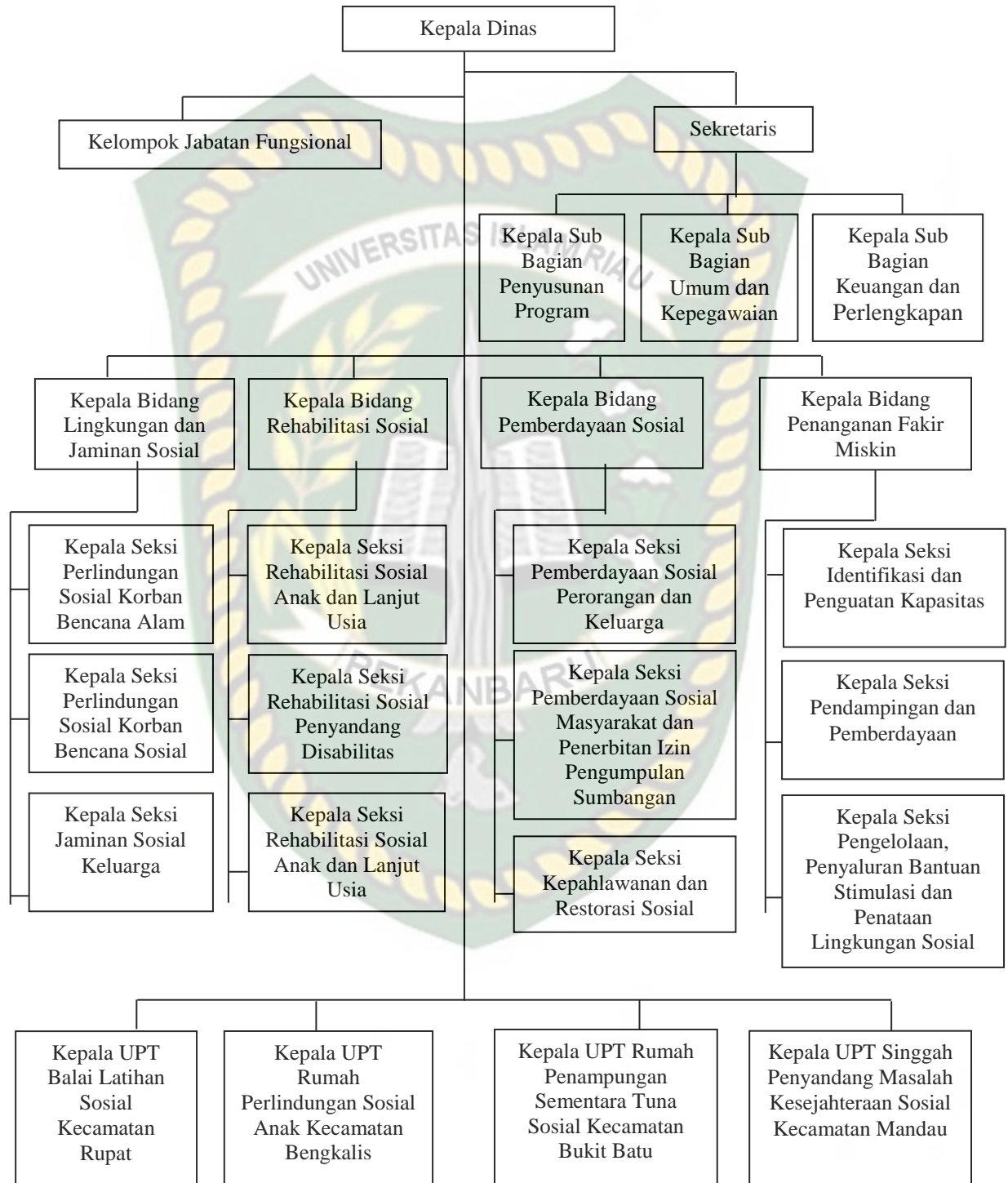
- Mewujudkan Perlindungan, Jaminan, Rehabilitas, dan Pelayanan Sosial bagi PMKS.
- Meningkatkan Mutu Pelayanan Sosial Melalui Kelembagaan Sosial.
- Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang Baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ditetapkan beberapa tujuan, yakni:

1. Meningkatkan sistem pelayanan sosial.
2. Meningkatkan kualitas hidup anak panti dan meningkatkan peran serta kelembagaan sosial lainnya.
3. Mensejahterakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin, KAT) dan PMKS lainnya.
4. Mensejahterakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (penyandang cacat dan penyakit sosial) dan PMKS lainnya.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 42 tahun 2016 tanggal 30 November 2016 :

Gambar IV.1 : Struktur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis



Sumber: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

D. Fungsi dan Tujuan Organisasi

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 terbitlah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial kabupaten Bengkalis. Dinas Sosial memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial.
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial.
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Sosial.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

E. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya di dalam organisasi adalah sumber daya manusia dan sarana prasana yang menunjang segala proses menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia sendiri yakni orang-orang yang menjabat (ASN) melaksanakan tugas dan fungsinya yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Adapun jumlah ASN berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

Tabel IV. 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas
2	Pejabat Administrator	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Pejabat Pengawas	19	Kasi, Kasubbag dan Kepala UPTD
4	Pegawai ASN Golongan IV	1	Staf
5	Pegawai ASN Golongan III	6	Staf
6	Pegawai ASN Golongan II	29	Staf
7	Pegawai Honorer	79	Tenaga Administrasi, Kebersihan, Supir dan Keamanan
Jumlah		140	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Setiap jabatan tersebut, mereka memiliki uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

3. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bengkalis.

b. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Tugas Sekretaris:

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas dan Fungsinya ialah :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
2. Perlindungan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam.

3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga.
5. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas dan fungsinya ialah:

1. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan lembaga, untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas luar panti dan lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang provinsi.

4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang provinsi.
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang provinsi.
6. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
7. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
8. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial diluar panti atau lembaga.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas dan fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan,, keperintisan, kesetiakawanan, pembinaan mualaf, restorasi sosial dan pemakaman.
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun non tertulis.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Tugas dan Fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan.
3. Pelaksanaan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan.
4. Pelaksanaan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.
5. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten.
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

F. Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PKH)

Sumber daya manusia PKH direkrut, diseleksi dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Penggunaan sumber daya manusia disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Negara. Adapun tugas dan fungsi sumber daya manusia PKH secara umumnya sebagai berikut:

1. Penasihat Nasional

Penasihat nasional berada dibawah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan bertanggung jawab kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Penasihat nasional bertugas membantu pelaksana PKH pusat untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga internasional, dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.

2. Tenaga Bantuan Teknis

Bertugas memberikan bantuan teknis pada pelaksanaan PKH meliputi validasi, terminasi, bantuan sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya.

3. Tenaga Ahli

Tenaga ahli bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

4. Koordinator Regional

Koordinator regional bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH untuk:

- a) Memastikan bisnis proses berjalan sesuai ketentuan ditingkat regional
- b) Memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan ditingkat regional
- c) Membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan ditingkat regional
- d) Pengelolaan penanganan pengaduan ditingkat regional

- e) Melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- f) Mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusi PKH ditingkat regional
- g) Memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayah kerjanya

5. Koordinator Wilayah

Koordinator wilayah bertugas membantu kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:

- a) Memastikan bisnis proses berjalan sesuai ketentuan ditingkat daerah provinsi
- b) Memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan ditingkat daerah provinsi
- c) Membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi
- d) Pengelolaan penanganan pengaduan ditingkat daerah provinsi
- e) Melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- f) Mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH ditingkat provinsi
- g) Memberikan penilaian kinerja koordinator kabupaten/kota dan administrator pangkalan data diwilayah kerjanya

6. Koordinator Kabupaten/Kota

Bertugas membantu kepala dinas sosial kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH ditingkat kabupaten/kota dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial dan administrator pangkalan data diwilayah kerjanya.

7. Pekerja Sosial Supervisor

Bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan oleh pendamping sosial diseluruh wilayah dampingan, melaksanakan pembahasan kasus (*case conference*) dalam pelaksanaan P2K2, melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian isu, keluhan dan kasus, menyusun menyebarkan informasi pelaksanaan PKH melalui berbagai media.

8. Pendamping Sosial

Bertugas melaksanakan tugas pendamping PKH di setiap kecamatan.

9. Asisten Pendamping Sosial

Bertugas membantu pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendamping PKH di kecamatan.

10. Administrator Pangkalan Data

Bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan mendistribusikan data PKH dipusat, provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif tipe deskriptif dengan cara pencarian informasinya melalui survey turun lapangan menyebarkan kuesioner yang telah dirancang oleh peneliti yang sebelumnya telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas agar kuesioner yang didistribusikan dapat memberikan gambaran, agar data tidak memiliki kendala normalitas dan syarat-syarat untuk melakukan pengujian hipotesis lainnya.

Identitas responden berguna untuk mengetahui seberapa banyak responden yang berdasarkan tingkat jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih memperjelas hasil penelitiannya. Secara rincinya identitas responden penelitian akan disajikan pada tabel dibawah ini:

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi suatu pekerjaan, laki-laki biasanya akan bekerja lebih cepat dari pada perempuan, tetapi perempuan akan bekerja lebih rapi dalam hasil pekerjaannya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu diharapkan keduanya mampu bekerja sama dengan baik. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat emosional, dimana laki-laki akan lebih cepat terpancing

emosi dari pada perempuan dan ini akan berpengaruh pada hasil pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	7	23%
2	Perempuan	23	77%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.1, terlihat bahwa responden yang terdiri dari pegawai, pendamping, dan peserta PKH kelurahan Tanjung Kapal. Dari 30 responden, yang menjadi responden laki-laki sebanyak 7 dengan jumlah persentasenya 23%, sedangkan responden Perempuan sebanyak 23 atau dengan jumlah persentase 77%. Jadi yang paling dominan menjadi responden pada penelitian ini ialah perempuan, sebagaimana yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas dan KASI Jaminan Sosial Keluarga “*dikarenakan responden dari peserta PKH yang mengelola penerimaan dananya ialah Ibu atau wanita yang mengurus keluarga tersebut*” (Wawancara, Senin 10 Februari 2020 pukul 10.30 WIB).

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Berikut tingkat umur yang peneliti jadikan responden :

Tabel V.2 Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	20 - 29 tahun	4	13%
2	30 – 39 tahun	11	37%
3	40 – 49 tahun	8	27%
4	50 – 59 tahun	5	17%
5	60 + tahun	2	6%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.2, dalam hal ini peneliti mendapatkan data mengenai umur keseluruhan responden yang dibagi 5 kelompok. Diantaranya rentang umur 20-29 tahun terdapat 4 orang (13%), rentang umur 30-39 tahun terdapat 11 orang (37%), selanjutnya rentang umur 40-49 tahun terdapat 8 orang (27%), rentang umur 50-59 tahun terdapat 5 orang (17%), dan rentang umur 60 tahun keatas terdapat 2 orang (6%). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang paling dominan menjadi responden peneliti berada pada rentang umur 30-39 tahun. Ini menjadi tolak ukur bagi responden dalam merekap hasil jawaban kuesioner. Dengan rentang umur seperti ini, yang cukup matang dan dewasa peneliti harapkan responden bisa mengerti atas pertanyaan yang diberikan dan menjawab dengan baik.

3. Identitas Reponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan didunia ini. Seseorang yang pendidikan akan berfikir secara luas dan rasional , dapat membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Orang yang berpendidikan juga bisa lebih mencerna perkataan yang subyektif dan

formal, berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan mereka terlihat sulit untuk mengartikan setiap bahasa-bahasa yang kita berikan dikarenakan terbiasa menggunakan bahasa daerah.

Untuk mengetahui, berikut jumlah responden dengan tingkat pendidikannya:

Tabel V.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	5	17%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5	17%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8	26%
4	Diploma (D1, D2, D3, D4)	4	13%
5	Sarjana (S1)	6	20%
6	Pascasarjana (S2)	2	7%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.3, diketahui bahwa responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni berjumlah 8 orang dengan persentase 26%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang terdiri dari Pegawai Dinas sosial dan masyarakat peserta PKH memiliki pendidikan yang cukup baik, dan semua respondennya dilatar belakangi dengan pendidikan setidaknya mereka bisa membaca terutama bagi peserta PKH.

B. Hasil dan Pembahasan

Setelah menjelaskan identitas responden penelitian, selanjutnya pada sub bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian dan sekaligus membahas dari tanggapan-tanggapan responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara oleh Pegawai Dinas Sosial dan peserta PKH.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja pelaksanaan kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada ditingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan pada tingkat warga/masyarakat, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil (dalam buku Leo Agustino, 2016;133-134).

Pemahaman tentang maksud umum dari standard dan sasaran kebijakan adalah penting. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan yang bersangkutan. Pelaksanaan yang berhasil bisa saja menjadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari dan memahami apa yang menjadi standard dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Berikut tanggapan 30 responden berdasarkan penyebaran kuesioner yang terdiri dari Pegawai Dinas Sosial dan masyarakat peserta PKH :

Tabel V.4 Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Standard dan Sasaran Kebijakan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Data penerimaan dana	6 (50%)	6 (50%)	0 (0%)	12 (100%)
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2 (17%)	7 (58%)	3 (25%)	12 (100%)
3	Penggunaan dana dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial	6 (50%)	5 (42%)	1 (8%)	12 (100%)
Jumlah		14	18	4	36
Rata-rata		5	6	1	12
Persentase		42%	50%	8%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.4, diketahui untuk indikator standard dan sasaran kebijakan diperoleh dari jawaban responden pegawai Dinas Sosial pada item pertama yang menjawab terlaksana sebanyak 6 orang (50%), lalu yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang (50%), dan yang menjawab kurang terlaksana 0 tidak ada (0%). Untuk item yang kedua, 2 orang (18%) menjawab terlaksana, sedangkan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 orang (58%), dan yang menjawab kurang terlaksana 3 orang (25%). Diitem ketiga, yang menjawab terlaksana sebanyak 6 orang (50%), sedangkan jawaban cukup terlaksana sebanyak 5 orang (42%) dan kurang terlaksana sebanyak 1 orang (8%).

Maka disimpulkan, jumlah rata-rata ketiga item penilaian indikator standard dan sasaran kebijakan dari 12 responden pegawai Dinas Sosial kabupaten Bengkalis yang berpendapat terlaksana sebanyak 5 orang (42%), yang

berpendapat cukup terlaksana sebanyak 6 orang (50%) dan kurang terlaksana sebanyak 1 orang (8%). Sehingga dengan keseluruhan jumlah ini peneliti mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selain dari hasil jawaban responden pada pengisian kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial didampingi KASI Jaminan Sosial Keluarga mengenai indikator Standard dan sasaran tujuan, beliau menyatakan:

“untuk sasaran tujuan ini berartikan untuk peserta PKH, dulu pada awal-awalnya pendataan sesuai dengan statistik (BPS), dibantu dengan aparat desa masing-masing. Jadi data PKH adalah data kemiskinan yang sudah jadi yang kami terima lalu kami kirim kepusat untuk diproses sesuai atau tidak untuk menjadi penerima dana tersebut. Jadi saat sekarang jika masih ditemukan ada masyarakat yang kita lihat mampu dan rumah layak dihuni, itu semua dari awal pendataan karena orang pusat tidak ada langsung mendata. Namun sejak tahun 2017, barulah semua dilimpahkan pada Dinas sosial. Dan kami melakukan observasi setiap monitoring pencairan dana 3 bulan sekali langsung kelapangan mencari masyarakat-masyarakat yang sebenarnya sudah sejahtera dan bisa dikatakan tidak layak lagi untuk menerima dana ini lalu kami proses kirim kepusat untuk dikeluarkan. Semua ini kami lakukan agar tujuan dari PKH benar-benar berjalan sesuai yang ditetapkan. Dan selama ini juga semua berjalan dengan baik sekalian kita melakukan evaluasi”(Wawancara, Senin, 10 Febuari 2020 pukul 10.30 WIB).

Selanjutnya, item penilaian jawaban dari 18 responden peserta PKH kelurahan Tanjung Kapal melalui penyebaran kuesioner, sebagai berikut:

Tabel V.5 Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Standard dan Sasaran Kebijakan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Data penerimaan dana	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (100%)
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (100%)
3	Penggunaan dana dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial	4 (22%)	11 (61%)	3 (17%)	18 (100%)
Jumlah		40	11	3	54
Rata-rata		13	4	1	18
Persentase		72%	22%	6%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari penjelasan tabel V.5, untuk indikator standard dan sasaran kebijakan yang jawabannya diperoleh dari peserta PKH kelurahan Tanjung Kapal pada item pertama jawaban yang dinyatakan terlaksana sebanyak 18 orang (100%), yang menjawab cukup terlaksana tidak ada (0%), dan 0 (0%) untuk jawaban kurang terlaksana. Item yang kedua, jawaban terlaksana sebanyak 18 orang (100%), kemudian cukup terlaksana tidak ada (0%), dan kurang terlaksana 0 (0%). Pada item ketiga, jawaban terlaksana ada 4 orang (22%), untuk yang cukup terlaksana sebanyak 11 orang (61%), dan jawaban kurang terlaksana sebanyak 3 orang (17%).

Dan dari 3 item penilaian ini, disimpulkan bahwa seluruh jawaban 18 responden peserta PKH dengan indikator standard dan sasaran kebijakan memiliki nilai rata-rata untuk jawaban terlaksana 13 orang (72%), jawaban cukup terlaksana 4 orang (22%), dan jawaban kurang terlaksana hanya 1 orang (6%). Maka peneliti mengkategorikan seluruhnya “Terlaksana”.

Berdasarkan penelitian dilapangan, untuk indikator standard dan sasaran kebijakan peneliti merangkumkan dengan seluruh hasil jawaban kuesioner dari pegawai Dinas Sosial maupun masyarakat dan juga dari hasil observasi, peneliti kategorikan cukup terlaksana. Dalam pendataan setiap peserta PKH masih banyak terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Kesalahan pendataan ini terjadi akibat kurangnya kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Padahal saat peneliti melakukan observasi lapangan, dari keseluruhan jumlah peserta PKH di Kelurahan Tanjung Kapal yang sebanyak 200 peserta, namun yang bisa benar-benar dikategorikan keluarga miskin hanya sebagian dari jumlah peserta tersebut dan selebihnya ialah keluarga yang bisa dikategorikan tidak miskin atau mampu. Akibat yang didapatkan adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan memenuhi kriteria PKH tidak bisa menerima dana tersebut. Dan bagi masyarakat yang menerima dana PKH, mereka mengakui menggunakan dana PKH ini untuk keperluan diluar dari bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mereka memberi alasan, kebutuhan hidup pada saat ini sangat besar dan juga mereka mengatakan tidak memiliki hasil yang tetap. Jadi mau tidak mau terkadang saat penerimaan dana

sudah cair mereka langsung membeli kebutuhan-kebutuhan yang mereka anggap perlu didahulukan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan dari proses pelaksanaan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan sebuah proses pelaksanaan. Tetapi diluar dari sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang wajib diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ini dikarenakan ketika sumber daya manusia yang kompeten tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah. Maka dari itu semua, perlunya keserasian dan berjalan bersama antara ketiga sumber daya ini.

Berikut tanggapan 30 responden berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dengan pegawai Dinas Sosial dan peserta PKH :

Tabel V.6 Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Sumber Daya

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sumber Daya Manusia	7 (58%)	5 (42%)	0 (0%)	12 (100%)
2	Sumber Daya Waktu	2 (17%)	8 (66%)	2 (17%)	12 (100%)
3	Sumber Daya Finansial	3 (25%)	4 (33%)	5 (42%)	12 (100%)
Jumlah		12	17	7	36
Rata-rata		4	6	2	12

Persentase	33%	50%	17%	100%
------------	-----	-----	-----	------

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.6, dapat diketahui hasil pada indikator sumber daya responden pegawai Dinas Sosial. Item penilaian pertama jawaban terlaksana sebanyak 7 orang (58%), sedangkan cukup terlaksana sebanyak 5 orang (42%), dan kurang terlaksana tidak ada atau 0 (0%). Untuk item penilaian kedua jawaban terlaksana sebanyak 2 orang (17%), cukup terlaksana sebanyak 8 orang (66%), dan kurang terlaksana sebanyak 2 orang (17%). Kemudian di item penilaian ketiga, jawaban terlaksana sebanyak 3 orang (25%), cukup terlaksana sebanyak 4 orang (33%), dan kurang terlaksana sebanyak 5 orang (42%).

Maka secara keseluruhan nilai rata-rata yang didapatkan pada indikator sumber daya dari 12 responden pegawai Dinas Sosial, yang menjawab terlaksana ada 4 orang (33%), cukup terlaksana sebanyak 6 orang (50%), dan jawaban tidak terlaksana sebanyak 2 orang (17%). Sehingga peneliti dapat mengategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selain dari hasil pengisian kuesioner, peneliti juga mendapatkan beberapa informasi dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial didampingi KASI Jaminan Sosial Keluarga Kabupaten Bengkalis mengenai indikator sumber daya ini, beliau menyatakan:

“untuk daya dukung ini kami sudah cukup baik lakukan. Untuk daya dukung manusia, setiap pendamping kecamatan mereka diadakan diklat diPadang Sumatera Barat, dan untuk jumlahnya sendiri satu Kabupaten ada sekitar 72 SDM didalamnya terdiri koordinator kabupaten, operator, pendamping PKH

pusat dan otonomi yang tersebar setiap kecamatan. Namun, untuk diKelurahan Tanjung Kapal sendiri ada kendala yang sampai saat ini terjadi, yakni kendala dalam sarana pencairan dana. DiKelurahan Tanjung kapal dalam pengambilan dana masih diagen-agen kecil, dikarenakan disana tidak ada Bank Negara Indoneasia (BNI). Karena ketetapan dari nasional untuk Kabupaten Bengkalis itu BNI. Jika terjadi kesalahan PIN, atau kartu ATM terblokir peserta PKH harus pergi k Dumai dengan jarak yang cukup jauh dan harus menyebrang melalui Kapal Roro. Pada permasalahan ini kami tidak bisa mengatasi nya, karena ini bukan kewenangan Dinas Sosial. Tetapi setiap ada permasalahan ini, pendamping wajib mendampingi peserta PKH dalam memperbaiki keluhan-keluhan yang terjadi. (Wawancara, Senin 10 Febuari 2020, pukul 10.30 WIB).

Selanjutnya, jawaban hasil penelitian kuesioner kepada 18 responden masyarakat peserta PKH, sebagai berikut:

Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Sumber Daya

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sumber Daya Manusia	6 (33%)	10 (56%)	2 (11%)	18 (100%)
2	Sumber Daya Waktu	5 (27%)	10 (56%)	3 (17%)	18 (100%)
3	Sumber Daya Finansial	7 (39%)	0 (0%)	11 (61%)	18 (100%)
Jumlah		18	20	16	54
Rata-rata		6	7	5	18
Persentase		33%	39%	28%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari penjelasan tabel V.7, diketahui hasil untuk indikator sumber daya responden peserta PKH kelurahan Tanjung kapal. Pada item penilaian pertama, jumlah terlaksana sebanyak 6 orang (33%), kemudian cukup terlaksana sebanyak 10 orang (56%), dan kurang terlaksana sebanyak 2 orang (11%). Untuk item penilaian kedua, jumlah terlaksana sebanyak 5 orang (27%), cukup terlaksana sebanyak 10 orang (56%), dan yang kurang terlaksana sebanyak 3 orang (17%). Dan item penilaian ketiga, jumlah terlaksana ada 7 orang (39%), cukup terlaksana tidak ada (0%), dan kurang terlaksananya sebanyak 11 orang (61%).

Maka secara keseluruhan, nilai rata-rata yang didapatkan 3 item penilaian pada indikator sumber daya dari 18 responden peserta PKH. Yang menjawab terlaksana sebanyak 6 orang (33%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 orang (39%) dan jawaban kurang terlaksana sebanyak 5 orang (28%). Sehingga peneliti dapat mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Dan dari hasil observasi lapangan serta melihat jawaban-jawaban yang diberikan oleh masyarakat, untuk sumber daya finansial masih ada beberapa pengakuan dari masyarakat jika saat pengambilan dana melalui agen-agen kecil tersebut mereka dikenai biaya potongan sebesar Rp. 10.000. Padahal saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial kabupaten Bengkalis, tidak ada potongan uang untuk pengambilan dana PKH tersebut. Hal ini yang harus dihindari dan diawasi kembali kepada pendamping-pendamping kecamatan dan memberi teguran kepada agen-agen kecil yang menangani pencairan dana disetiap kelurahan/desa.

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan sebuah pelaksanaan kebijakan. Komunikasi pelaksanaan suatu kebijakan dapat berupa sosialisasi, penyebaran informasi, tata cara ketentuan dalam suatu kebijakan tersebut. Semakin baik komunikasi yang kita bangun dalam sebuah pelaksanaan kebijakan maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi begitupun sebaliknya.

Berikut tanggapan dari 30 responden yang terdiri pegawai Dinas Sosial dan peserta PKH berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, sebagai berikut:

Tabel V.8 Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Komunikasi

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PKH	7 (58%)	5 (42%)	0 (0%)	12 (100%)
2	Kejelasan informasi dan peraturan pihak pelaksana (pendamping) kepada peserta penerima dana PKH	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12 (100%)
3	Rapat pendamping dan Dinas Sosial	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12 (100%)
Jumlah		23	13	0	36
Rata-rata		8	4	0	12
Persentase		67%	33%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dilihat dari tabel V.8 hasil dari tanggapan 12 responden pegawai Dinas Sosial indikator Komunikasi mengatakan. Pada item pertama, jumlah yang terlaksana sebanyak 7 orang (58%), cukup terlaksana 5 orang (42%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%). Selanjutnya item kedua, jumlah terlaksana sebanyak 8 orang (67%), cukup terlaksana 4 orang (33%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%). Dan pada item ketiga, yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang (67%), cukup terlaksana sebanyak 4 orang (33%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%).

Maka jumlah nilai rata-rata seluruhnya pada 3 item penilaian indikator komunikasi dari 12 reponden pegawai Dinas Sosial menjawab terlaksana sebanyak 8 orang (67%), jawaban cukup terlaksana sebanyak 4 orang (33%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%). Dengan demikian peneliti mengategorikan item penilaian ini “Terlaksana”.

Selain hasil pengisian kuesioner, peneliti juga mendapatkan hasil dari wawancara untuk indikator komunikasi. Hasil wawancara tersebut didapatkan dari Kepala Dinas Sosial didampingi KASI Jaminan Sosial Keluarga Kabupaten Bengkalis, beliau menyatakan:

“komunikasi selama ini berjalan dengan lancar tidak ada permasalahan, dari pemerintahan pusat langsung berkoordinasi dengan koordinator Kabupaten dan operator. Pelaksanaan PKH yang dilapangan atau pendamping ini perpanjangan tangannya dari Kementrian Sosial bukan Dinas Sosial. Memang untuk kesekretariatnya di Dinas Sosial tetapi untuk Surat Keputusan (SK) langsung dari

kementrian Sosial. Dan untuk sosialisasi, kami sering mengadakan pertemuan dengan para pendamping. Kemudian para pendamping ini memberikan sosialisasi lanjutan dan informasi lanjutan kepada para peserta PKH. (Wawancara, Senin 10 Febuari 2020 pukul 10.30 WIB).

Selanjutnya, hasil jawaban 18 responden dari peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal melalui penyebaran kuesioner:

Tabel V.9 Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Komunikasi

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PKH	5 (28%)	9 (50%)	4 (22%)	18 (100%)
2	Kejelasan informasi dan peraturan pihak pelaksana (pendamping) kepada peserta penerima dana PKH	12 (67%)	4 (22%)	2 (11%)	18 (100%)
3	Rapat pendamping dan Dinas Sosial	5 (28%)	11 (61%)	2 (11%)	18 (100%)
Jumlah		22	24	8	54
Rata-rata		7	8	3	18
Persentase		39%	44%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.9, hasil tanggapan 18 responden peserta PKH indikator komunikasi menyatakan. Pada item penilaian pertama, yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang (28%), cukup terlaksana 9 orang (50%) dan kurang terlaksana sebanyak 4 orang (22%). Kemudian diitem kedua, jawaban terlaksana sebanyak

12 orang (67%), jawaban cukup terlaksana 4 orang (22%) dan jawaban kurang terlaksana sebanyak 2 orang (11%). Dan diitem ketiga, jawaban terlaksana sebanyak 5 orang (28%), jawaban cukup terlaksana sebanyak 11 orang (61%) dan kurang terlaksana sebanyak 2 orang (11%).

Dengan jumlah ini, maka nilai rata-rata keseluruhan dari 3 item indikator komunikasi dari 18 responden peserta PKH yang menjawab terlaksana sebanyak 7 orang (39%), yang menjawab cukup terlaksana 8 orang (44%), dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 orang (17%). Dan peneliti mengkategorikan hasil nilai ini dengan “Cukup Terlaksana”.

Dan dari hasil observasi lapangan, peneliti mendapatkan informasi bahwa setiap pencairan dana PKH mereka dikumpulkan dan diadakan sosialisasi perkelompok yang sudah dibentuk oleh para pendamping dan mereka juga diberi informasi kepada para pendamping setiap adanya pencairan dana ataupun adanya keterlambatan dalam pencairan dana.

4. Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yakni daya dukung terhadap organisasi, nilai-nilai yang terdapat diorganisasi, dan hubungan internal didalam organisasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan agar pelaksanaanya bersifat disiplin. Agen pelaksana merujuk pada organisasi sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan yang berlaku, mekanisme yang telah ditetapkan serta komunikasi dan hubungan internal serta eksternal seperti para pelaksana dengan sasaran program kebijakan itu sendiri.

Berikut tanggapan kuesioner dari 30 responden yang terdiri dari pegawai Dinas Sosial dan masyarakat peserta PKH, sebagai berikut:

Tabel V.10 Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Agen Pelaksana

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Daya dukung organisasi	5 (42%)	7 (58%)	0 (0%)	12 (100%)
2	Nilai-nilai dalam organisasi	4 (33%)	8 (67%)	0 (0%)	12 (100%)
3	Hubungan didalam organisasi	7 (58%)	5 (42%)	0 (0%)	12 (100%)
Jumlah		16	20	0	36
Rata-rata		5	7	0	12
Persentase		42%	58%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.10, dijelaskan hasil penilaian pada indikator agen pelaksana dengan jawaban 12 responden pegawai Dinas Sosial. Pada item pertama, jawaban terlaksana terdapat 5 orang (42%), jawaban cukup terlaksana 7 orang (58%), dan jawaban kurang terlaksana 0 (0%). Kemudian untuk item yang kedua, jawaban terlaksana sebanyak 4 orang (33%), jawaban cukup terlaksana sebanyak 8 orang (67%), dan kurang terlaksana tidak ada yang menjawab (0%). Dan item yang ketiga, jawaban terlaksana sebanyak 7 orang (58%), jawaban cukup terlaksana 5 orang (42%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 3 item penilaian indikator agen pelakasana 12 responden pegawai Dinas Sosial yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang (42%), kemudian yang

menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 orang (58%), dan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada sama sekali atau 0 (0%). Dan peneliti mengkategorikannya “Cukup Terlaksana”.

Selain dari hasil jawaban kuesioner 12 responden ini, peneliti juga mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial didampingi KASI Jaminan Sosial Keluarga kabupaten Bengkalis, beliau menyatakan:

“pemerintah kabupaten melalui kami Dinas Sosial sebagai agen pelaksananya mendukung 100% untuk program ini, apalagi pemerintah pusat inikan program nasional dan kami harus berupaya penuh untuk mensukseskan program ini”
(Wawancara, Senin 10 Febuari 2020 pukul 10.30 WIB).

Selanjutnya tanggapan dari 18 responden masyarakat peserta PKH kelurahan Tanjung Kapal melalui penyebaran kuesioner:

Tabel V.11 Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Agen Pelaksana

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Daya dukung organisasi	8 (44%)	10 (56%)	0 (0%)	18 (100%)
2	Nilai-nilai dalam organisasi	11 (61%)	7 (39%)	0 (0%)	18 (100%)
3	Hubungan didalam organisasi	6 (33%)	12 (67%)	0 (0%)	18 (100%)
Jumlah		25	29	0	54
Rata-rata		8	10	0	18
Persentase		44%	56%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.11 dijelaskan hasil penilaian indikator agen pelaksana dari jawaban 18 responden masyarakat peserta PKH. Pada item pertama, jawaban terlaksana sebanyak 8 orang (44%), kemudian jawaban cukup terlaksana sebanyak 10 orang (56%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban terlaksana sebanyak 11 orang (61%), cukup terlaksana sebanyak 7 orang (39%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban terlaksana sebanyak 6 orang (33%), cukup terlaksana 12 orang (67%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 18 responden peserta PKH indikator agen pelaksana yang menjawab terlaksana 8 orang (44%), jawaban cukup terlaksana sebanyak 10 orang (56%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%). Sehingga dapat peneliti mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Kemudian pada saat penelitian dan melakukan observasi, terlihat bahwa pengakuan dari masyarakat peserta PKH sangat dekat dengan para pendampingnya. Setiap ada permasalahan yang terjadi ataupun kendala dalam pengambilan dana peserta PKH pendamping ini lah yang membantu agar permasalahan ini bisa diatasi.

5. Lingkungan

Pada indikator lingkungan ini lah dimana suatu pelaksanaan kebijakan akan dilaksanakan. Yang didalamnya didukung dengan lingkungan ekonomi,

sosial dan pemerintah. Ini dimaksudkan kepada pengaruh suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya, berpengaruh tidaknya pada tingkat lingkungan sosial setidaknya partisipasi dan dukungan antar masyarakat sekitar, dan juga dukungan untuk pemerintahan. Jika lingkungan ini tidak kondusif, maka dapat menjadi akar dari kegagalan kebijakan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus mengupayakan dan memperhatikan kondisi lingkungan ini.

Berikut tanggapan dari penyebaran kuesioner kepada 30 responden pegawai Dinas Sosial dan peserta PKH untuk indikator lingkungan, sebagai berikut :

Tabel V.12 Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Lingkungan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Lingkungan Ekonomi	6 (50%)	6 (50%)	0 (0%)	12 (100%)
2	Lingkungan Sosial	3 (25%)	7 (58%)	2 (17%)	12 (100%)
3	Lingkungan Pemerintah	4 (33%)	8 (67%)	0 (0%)	12 (100%)
Jumlah		13	21	2	36
Rata-rata		4	7	1	12
Persentase		33%	58%	9%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.11 diketahui hasil 3 item penilaian indikator lingkungan jawaban yang diperoleh dari 12 reponden pegawai Dinas Sosial. Pada item pertama yang menjawab terlaksana 6 orang (50%), cukup terlaksana 6 orang

(50%), dan jawaban kurang terlaksana tidak ada yang menjawab (0%). Selanjutnya item kedua, jawaban terlaksana sebanyak 3 orang (25%), jawaban cukup terlaksana 7 orang (58%), dan jawaban kurang terlaksana 2 orang (17%). Kemudian item yang ketiga, jawaban terlaksana 4 orang (33%), cukup terlaksana 8 orang (67%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%).

Maka keseluruhan nilai rata-rata yang didapatkan atas jawaban dari 12 responden pegawai Dinas Sosial pada indikator lingkungan, jawaban terlaksana sebanyak 4 orang (33%), jawaban cukup terlaksana sebanyak 7 orang (58%), dan untuk jawaban kurang terlaksana hanya didapatkan 1 orang (9%). Dengan ini peneliti mengategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selain dari hasil jawaban kuesioner 12 responden pegawai Dinas Sosial, peneliti juga mendapatkan informasi melalui wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial didampingi KASI Jaminan sosial Keluarga, beliau menyatakan:

“tentunya ini berpengaruh sangat baik sekali untuk ekonomi masyarakat, dana ini sangat membantu kekurangan-kekurangan mereka dalam kelangsungan hidup. Apalagi bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dan untuk pemerintah sendiri, kami merasa dengan adanya program ini bisa membantu tingkat kesejahteraan di setiap daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan khususnya kabupaten Bengkalis”. (Wawancara, Senin 10 Februari 2020 pukul 10.30 WIB).

Selanjutnya, hasil tanggapan kuesioner 18 responden peserta PKH kelurahan Tanjung Kapal melalui penyebaran kuesioner :

Tabel V.13 Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Lingkungan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Lingkungan Ekonomi	7 (39%)	11 (61%)	0 (0%)	18 (100%)
2	Lingkungan Sosial	3 (17%)	10 (56%)	5 (27%)	18 (100%)
3	Lingkungan Pemerintah	7 (39%)	11 (61%)	0 (0%)	18 (100%)
Jumlah		17	32	5	54
Rata-rata		5	11	2	18
Persentase		27%	61%	11%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.13 hasil penilaian indikator lingkungan dari 18 responden peserta PKH kelurahan Tanjung kapal pada item pertama yang menjawab terlaksana 7 orang (39%), lalu jawaban cukup terlaksana 11 orang (61%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%). Kemudian pada item kedua, jawaban terlaksana 3 orang (17%), jawaban cukup terlaksana 10 orang (56%), dan jawaban kurang terlaksana ada 5 orang (27%). Dan pada item ketiga, jawaban terlaksana ada 7 orang (39%), cukup terlaksana 11 orang (61%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%).

Maka dari keseluruhan 3 item penilaian ini, nilai rata-rata yang didapatkan 18 responden peserta PKH indikator lingkungan untuk jawaban terlaksana sebanyak 5 orang (27 %), jawaban cukup terlaksana sebanyak 11 orang

(61%), dan jawaban kurang terlaksana hanya 2 orang (11%). Sehingga peneliti dapat mengategorikan “Cukup Terlaksana”.

Dan dari observasi yang didapatkan dilapangan, alasan yang diberikan masyarakat peserta PKH pun sangat positif. Mereka mengakui sejak adanya program PKH ini beban kehidupan setidaknya terbantu walaupun tidak semuanya. Bisa melengkap kebutuhan anak sekolah, bisa membeli obat-obatan bagi lanjut usia, dan bisa menutupi kekurangan yang lain. Dan saat ekonomi masyarakat membaik dari sebelumnya, pemerintah wajib untuk mengeluarkan peserta PKH dan menggantikan kepada masyarakat yang membutuhkan lainnya. Agar program ini benar-benar bisa tercapai dalam penanggulangan kemiskinan atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

6. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana adalah sikap atau perilaku yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Sikap ini merujuk kepada bagaimana pelaksana bersikap kepada para peserta PKH dan bagaimana sikap pelaksana dengan sesama pelaksana kebijakan tersebut. Sikap pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan dan tidaknya kinerja kebijakan. Karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah keputusan dari atas atau pemerintah daerah maupun pusat. Maka dari sikap pelaksana ini lah yang bisa membantu berjalannya kebijakan, sikap ini didalamnya terdiri dari demokratis, responsive dan transparansi.

Berikut tanggapan 30 responden pegawai Dinas Sosial dan peserta PKH dari penyebaran kuesioner untuk Indikator sikap pelaksana, sebagai berikut:

Tabel V.14 Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Indikator Sikap Pelaksana

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Demokratis	5 (42%)	7 (58%)	0 (0%)	12 (100%)
2	Responseive	3 (25%)	9 (75%)	0 (0%)	12 (100%)
3	Transparansi/ keterbukaan	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12 (100%)
Jumlah		16	20	0	36
Rata-rata		5	7	0	12
Persentase		42%	58%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.14 hasil penilaian dari 12 responden pegawai Dinas Sosial indikator sikap pelaksana dengan penyebaran kuesioner. Pada item pertama yang menjawab terlaksana ada 5 orang (42%), cukup terlaksana 7 orang (58%), dan kurang terlaksana tidak ada yang menjawab (0%). Sedangkan item kedua, yang menjawab terlaksana 3 orang (25%), cukup terlaksana 9 orang (75%), dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%). Dan item ketiga, yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang (67%), cukup terlaksana 4 orang (33%), kurang terlaksana 0 (0%).

Maka seluruh hasil 3 item penilaian 12 responden pegawai Dinas Sosial indikator sikap pelaksana dengan rata-rata nilai yang didapatkan jawaban terlaksana sebanyak 5 orang (42%), jawaban cukup terlaksana sebanyak 7 orang

(58) , dan tidak ada yang menjawab kurang terlaksana (0%). Dengan ini peneliti mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selain dari hasil jawaban kuesioner 12 reponden ini, peneliti juga mendapatkan informasi melalui wawancara langsung dengan Kepala Dinas sosial kabupaten Bengkalis didampingi KASI Jaminan Sosial Keluarga, beliau mengatakan:

“kami sebagai pelaksana program PKH, sangat merespon baik dan berusaha melaksanakan kinerja sebaik-baiknya. Mendengar segala masukan dari pendamping yang langsung turun lapangan melihat perkembangan para peserta PKH dan melakukan evaluasi jika ada kendala. Dan kami berharap bisa selalu berhubungan baik dengan para pendamping agar bisa sama-sama melaksanakan program ini dan mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera” (Wawancara, 10 Febuari 2020 pukul 10.30 WIB).

Selanjutnya, hasil tanggapan kuesioner dari 18 responden peserta PKH kelurahan Tanjung Kapal indikator sikap pelaksana:

Tabel V.15 Distribusi Tanggapan Responden Peserta PKH Kelurahan Tanjung Kapal Indikator Sikap Pelaksana

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Demokratis	4 (22%)	14 (78%)	0 (0%)	18 (100%)
2	Responsive	12 (67%)	6 (33%)	0 (0%)	18 (100%)
3	Transparansi/ keterbukaan	4 (22%)	12 (67%)	2 (11%)	18 (100%)

Jumlah	20	32	2	54
Rata-rata	6	11	1	18
Persentase	33%	61%	6%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.15 hasil penilaian indikator sikap pelaksana dari 18 responden peseta PKH melalui penyebaran kuesioner. Pada item pertama, yang menjawab terlaksana ada 4 orang (22%), cukup terlaksana 14 orang (78%), dan kurang terlaksana tidak ada (0%). Untuk item kedua, jawaban terlaksana 12 orang (67%), cukup terlaksana 6 orang (33%), dan kurang terlaksana tidak ada menjawab (0%). Selanjutnya item ketiga, untuk jawaban terlaksana sebanyak 4 orang (22%), cukup terlaksana 12 orang (67%), dan kurang terlaksana 2 orang (11%).

Maka keseluruhan hasil 3 item penilaian indikator sikap pelaksana dari 18 responden peserta PKH kelurahan Tanjung Kapal mendapatkan nilai rata-rata jawaban terlaksananya sebanyak 6 orang (33%), jawaban cukup terlaksana sebanyak 11 orang (61%), dan jawaban kurang terlaksana hanya 1 orang (6%). Dengan jumlah ini peneliti mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penelitipun menilai sikap pelaksana sudah cukup terlaksana. Ini dilihat dari pelayanan yang dilakukan pendamping kepada peserta, yang senantiasa selalu membantu jika ada kesulitan dalam pencairan dana dan bersifat adil kesemua peserta PKH. Dan pendamping berusaha bersifat transparan kepada peserta PKH, melalui pemberian informasi-informasi dan hal yang lainnya. Hal ini juga sangat dirasakan oleh peserta PKH. Terbukti

juga disaat peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pendamping PKH, mereka sangat merespon dan bersikap baik.

Setelah membahas hasil dari masing-masing indikator pada penelitian ini, kemudian peneliti membuat rekapitulasi dari seluruh indikator atas tanggapan 12 responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:

Tabel V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Sosial Terhadap Penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Standard dan Sasaran Kebijakan	5 (42%)	6 (50%)	1 (8%)	12 (100%)
2	Sumber Daya	4 (33%)	6 (50%)	2 (17%)	12 (100%)
3	Komunikasi	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12 (100%)
4	Agen Pelaksana	5 (42%)	7 (58%)	0 (0%)	12 (100%)
5	Lingkungan	4 (33%)	7 (58%)	1 (8%)	12 (100%)
6	Sikap Pelaksana	5 (42%)	7 (58%)	0 (0%)	12 (100%)
Jumlah		31	37	4	72
Rata-rata		5	6	1	12
Persentase		42%	50%	8%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.16 rekapitulasi keseluruhan hasil penilaian 6 indikator dari 12 responden pegawai Dinas Sosial yang masing-masing memiliki 3 item penilaian dalam penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan

Rupat Kabupaten Bengkalis. Maka dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil akhir, yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase (42%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase (50%), dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase (8%). Dengan demikian, hasil penelitian dari 12 responden pegawai Dinas Sosial dikategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selanjutnya, rekapitulasi tanggapan 18 responden peserta PKH dari seluruh indikator penelitian:

Tabel V.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden Peserta PKH Terhadap Penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Standard dan Sasaran Kebijakan	13 (72%)	4 (22%)	1 (6%)	18 (100%)
2	Sumber Daya	6 (33%)	7 (39%)	5 (28%)	18 (100%)
3	Komunikasi	7 (39%)	8 (44%)	3 (17%)	18 (100%)
4	Agen Pelaksana	8 (44%)	10 (56%)	0 (0%)	18 (100%)
5	Lingkungan	5 (27%)	11 (61%)	2 (11%)	18 (100%)
6	Sikap Pelaksana	6 (33%)	11 (61%)	1 (6%)	18 (100%)
Jumlah		45	51	12	108
Rata-rata		7	9	2	18
Persentase		39%	50%	11%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.17 rekapitulasi hasil keseluruhan penilaian 6 indikator dari 18 responden peserta PKH yang masing-masing memiliki 3 item penilaian dalam penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil akhir, yang menjawab terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase (39%), kemudian jawaban cukup terlaksana sebanyak 9 orang (50%), dan jawaban kurang terlaksana sebanyak 2 orang (11%). Maka dari hasil tersebut penelitian dengan hasil responden peserta PKH dikategorikan “Cukup Terlaksana”.

Dari tanggapan seluruh responden baik dari pegawai Dinas Sosial dan Peserta PKH, dapat disimpulkan bahwa penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis sesuai dengan variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini keduanya mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Dari hasil pengumpulan data yang menggunakan teknik kuesioner, wawancara, observasi serta dokumentasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kelurahan Tanjung Kapal belum berjalan secara efektif atau dikategoriksn cukup terlaksana. Dari 200 peserta yang terdata penerimaan dana PKH di Kelurahan Tanjung Kapal yang benar-benar memenuhi kriteria keluarga miskin atau kurang mampu yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat ialah hanya sebanyak 100 peserta. Artinya setengah dari peserta yang terdata dapat dikategorikan keluarga tidak miskin atau sudah mampu. Disini terjadi kesalahan pendataan yang dilakukan pemerintah kelurahan/desa dan bukan kesalahan dari

peserta PKH. Peserta PKH hanya menerima jika mereka sudah didatakan dan sudah terdaftar dipemerintahan pusat. Dan bagi para peserta PKH yang sudah berhasil mengangkat perekonomiannya dengan bantuan PKH ini mereka wajib dikeluarkan dan diganti dengan masyarakat lain yang dapat dikategorikan keluarga miskin atau kurang mampu. Namun biasanya terjadi penolakan dari peserta PKH yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ini dikarenakan mereka merasa kehidupan mereka tidak mampu dan butuh bantuan tetap dari pemerintah. Disini peran pemerintah daerah dan para pendamping memberikan sosialisasi dan membuka pola pikir masyarakat agar mereka memiliki kesadaran bahwa masih banyak lagi masyarakat kurang mampu yang butuh bantuan PKH ini agar penanggulangan kemiskinan ini dapat terjadi.

C. Faktor-faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

Hambatan adalah suatu rintangan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kegiatan. Hambatan ini bisa menjadi penyebab yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang peneliti rangkumkan perindikator, yakni:

1. Hambatan untuk indikator standard dan sasaran kebijakan ialah kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar kriteria keluarga penerima PKH. Mereka menganggap jika kehidupannya tidak mampu dan

mereka berhak menerima dana bantuan ini, padahal tidak seperti itu kriteria yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan sampai saat ini masih banyak sekali yang salah sasaran dalam penerimaan dana PKH. Dinas Sosial kabupaten Bengkalis pun sulit memberikan penjelasan dan mendata ulang masyarakat mana saja yang layak atau tidak menerima bantuan PKH.

2. Hambatan untuk indikator sumber daya ialah masih ada pemungutan atau potongan uang sebesar Rp.10.000 dari agen-agen kecil bagi peserta yang ingin mengambil uang penerimaan PKH.
3. Hambatan untuk indikator komunikasi ialah pelaksana PKH sulit berkomunikasi dengan peserta PKH yang tidak mengerti Bahasa Indonesia. Ada sebagian peserta PKH yang tinggal dipelosok dusun dan mereka hanya menggunakan Bahasa daerah sebagai Bahasa sehari-hari.
4. Hambatan indikator agen pelaksana ialah masih kurangnya pemahaman pelaksana organisasi terhadap aturan-aturan yang diterapkan.
5. Hambatan indikator lingkungan ialah masyarakat masih ada menganggap bahwa ekonominya belum meningkat dengan adanya penerimaan PKH dan mereka belum bisa sepenuhnya bersikap simpatik kepada lingkungan sekitarnya.
6. Hambatan indikator sikap pelaksana ialah pemerintah daerah masih kesulitan untuk mendekati masyarakat, masyarakat masih takut-takut jika ada pelaksana dari pemerintah daerah datang ketempat mereka dikarenakan mereka takut dikeluarkan dari peserta penerimaan dana PKH. Dengan hal ini pemerintah harus lebih bersikap demokratis , terbuka dan

menjaga hubungan baik dengan masyarakat peserta PKH agar mereka benar-benar merasakan bahwa program ini bisa membawa mereka dalam kehidupan yang lebih baik lagi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk indikator standard dan sasaran kebijakan yang memiliki item penilaian data penerimaan dana, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan dana dibidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah cukup terlaksana. Dikarenakan untuk sasaran peserta penerima dana PKH saat ini masih adanya kesalahan pendataan yang dilakukan oleh pendamping PKH dan pemerintahan kelurahan/desa diwilayah tersebut. Hal ini lah yang mengakibatkan pelaksanaan PKH di Kelurahan Tanjung Kapal belum efektif karena tidak sesuai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
2. Untuk indikator sumber daya dengan item penilaian sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya finansial dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah cukup terlaksana. Yang menjadi permasalahan hanyalah adanya pemungutan uang sebesar Rp.10.000 yang dilakukan agen-agen kecil saat peserta PKH mencairkan dana PKH nya. Dari pihak pemerintah daerah sudah melakukakan pelaksanaan PKH dengan baik dan dari hasil wawancara yang didapatkan bahwasannya para pendamping diberikan pelatihan ataupun diklat nasional.

3. Untuk indikator komunikasi yang memiliki item penilaian sosialisasi kepada masyarakat, kejelasan informasi, dan rapat antara pendamping dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah terlaksana. Pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga komunikasi antara pemerintah dengan peserta PKH. Informasi-informasi yang ada selalu diturunkan ke peserta PKH. Agar peserta tidak kebingungan jika terjadi keterlambatan pencairan dana.
4. Untuk indikator agen pelaksana yang memiliki item penilaian daya dukung organisasi, nilai-nilai didalam organisasi, dan hubungan didalam organisasi dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah cukup terlaksana. Bahwasannya pemerintah daerah sangat mendukung program ini dikarenakan bisa meningkatkan kualitas kehidupan disetiap daerah kabupaten Bengkalis. Dan para pendamping pun selalu siap membantu peserta jika terjadi kesalahan ataupun kesulitan saat melakukan pencairan dana.
5. Untuk indikator lingkungan yang memiliki item penilaian ekonomi, sosial, dan pemerintah hasil keseluruhan yang didapatkan ialah cukup terlaksana. Program ini sangat mendukung untuk peningkatan ekonomi masyarakat, bisa membantu kebutuhan anak sekolah dan membeli kebutuhan lanjut usia. Dan juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Untuk indikator sikap pelaksana yang memiliki item penilaian demokratis, responsive, transparan atau keterbukaan hasil keseluruhan

yang didapatkan ialah cukup terlaksana. Para pelaksana merespon baik dan berusaha melaksanakan kinerja untuk program ini sebaik-baiknya dan menjaga hubungan baik dengan para peserta.

Dari seluruh hasil kesimpulan setiap indikator, pelaksanaan yang berhasil dilaksanakan dengan baik atas penilaian pegawai Dinas Sosial ialah indikator Komunikasi, disebabkan karena penilaian mencapai kategori Terlaksana. Dengan ini bisa dilihat bahwa pemerintah daerah berhasil menjaga komunikasi kepada pegawai dan seluruh peserta PKH, mereka menganggap kunci keberhasilan dari sebuah pelaksanaan kebijakan ialah dengan menjaga komunikasi, karena seluruh ketentuan dan informasi-informasi yang diperlukan didapatkan dari komunikasi baik internal maupun eksternal. Dan pelaksanaan yang dinyatakan berhasil menurut penilaian peserta PKH ialah indikator standard dan sasaran kebijakan penilaian mencapai kategori Terlaksana. Atas penilaian tersebut disimpulkan bahwa masyarakat peserta PKH benar-benar menganggap dirinya layak untuk menerima dana PKH, dan kehidupan mereka merasa terbantu dengan penerimaan dana ini. Meskipun pada hasil observasi lapangan bisa dilihat hanya sebagian dari peserta PKH yang benar-benar tergolong keluarga miskin. Ini yang harus dievaluasi oleh pemerintahan daerah.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin peneliti buat dari keseluruhan hasil yang telah didapatkan:

1. Demi terlaksananya PKH dengan baik, peneliti mengharapkan kepada para pelaksana PKH yang ditanggung jawabkan oleh Dinas Sosial agar lebih

teliti dan bersikap tegas dalam mendata ulang masyarakat yang benar-benar berhak menerima dana ini jangan terjadi kesalahan yang merugikan pemerintah. Agar tujuan yang sesungguhnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik.

2. Kepada pelaksana terutama pendamping disetiap kecamatan untuk melakukan pengawasan setiap pencairan dana, agar tidak ada biaya pengambilan diagen-agen kecil tersebut.
3. Perlunya pengawasan yang ketat dari pemerintah tentang penggunaan dana yang digunakan peserta PKH, jika ada yang menggunakan diluar dari bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial berikan sanksi atau dikeluarkan dari peserta penerimaan dana PKH.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topik yang sama, sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Andry, Hendry dan A. Tarmizi Yussa, 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Ardana I Komang, dkk, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Greha Ilmu.
- Edy, Sutrisno, 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Kharisma Putra Utama.
- Hamalik, Oemar, 2001. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hardiyansyah, 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Penerbit Gava Media.
- Heena, Aime, 2010. *Manajemen Strategis Keorganisasian Publik*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Indiahono Dwiyanto, 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta, Gava Media.
- Kartono, Kartini, 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

- Kholif, Khodziah Isnaini, Irwan Noor dkk. 2014. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. Skripsi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, hal 709-714.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Malayu, Hasibuan, 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian, 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani, 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Program Studi Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Jurnal Publik*, hal 1-4.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Siswanto, 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian*. Bandung, Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2015. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Penerbit Erlangga.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Soejono, Soekanto, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Tahir, Arifin, 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung, Alfabeta.

Terry R. George, 2013. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Saworaya, Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, PT Adhitya Andrebina Agung.

Wedayanti, Made Devi. 2018. *Manajemen Corporate Social Responsibility*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Zulfian, 2014. *Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, hal 36-38.

Zulkifli dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Dokumen :

Bahan Bacaan Modul 7 Kebijakan dan Pengetahuan Tentang PKH.

Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas Kerja Mahasiswa, 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Buku pedoman Kebijakan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

